



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

JALAN MERDEKA NO.97B-C MANOKWARI

TELEPON: (0986) 214122 FAKSIMILE: (0986) 214124 E-mail: kanwiljpbnpapuabarat@gmail.com

Nomor : S-1390 /WPB.33/2018

08 November 2018

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian KFR Triwulan III Tahun 2018 Provinsi Papua Barat

Yth. Direktur Pelaksanaan Anggaran

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Lantai IV

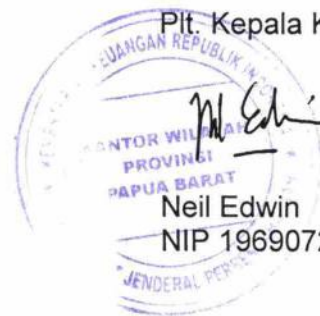
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, berikut disampaikan KFR Triwulan III Tahun 2018 Provinsi Papua Barat. Adapun *softcopy* dalam format *pdf* telah kami kirim melalui email lo.ditpa@gmail.com dan ditpa@kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pit. Kepala Kantor,



Neil Edwin

NIP 19690723 199603 1 006

KAJIAN FISKAL REGIONAL



TRIWULAN III
2018

Penanggung Jawab : Paulina Latupeirissa Ketua Tim : Neil Edwin
Penyusun : Feri Pramusetiyo | Ri Setia Utama | Kurniawan Cahyo
Utomo | Enjun Fajar Sadida | Leonardo Rajagukguk | Melinus

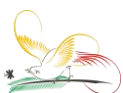
KANWIL DJEN
PERBENDAHARAAN
PAPUA BARAT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR BOKS.....	vii
DAFTAR PUSTAKA.....	viii
BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....	1
A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	1
1. Nilai PDRB.....	2
2. Pertumbuhan PDRB.....	2
B. NERACA PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....	2
C. INFLASI.....	3
D. INDIKATOR KESEJAHTERAAN.....	4
1. Tingkat Kemiskinan.....	4
2. Tingkat Ketimpangan.....	5
3. Tingkat Pengangguran.....	5
BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBN.....	7
A. PENDAPATAN NEGARA.....	8
1. Penerimaan Perpajakan.....	8
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	9
B. BELANJA NEGARA.....	9
1. Belanja Pemerintah Pusat.....	9
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).....	10
3. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	10
C. PROGNOSES REALISASI APBN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2018.....	11
BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS APBD.....	14
A. PENDAPATAN DAERAH.....	15
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	15
2. Kemandirian Daerah.....	15
3. Pendapatan Transfer.....	16
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	16
B. BELANJA DAERAH.....	16
C. PROGNOSES REALISASI APBD SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2018.....	17
BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN.....	18
A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN.....	18
B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN.....	18
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan.....	18
2. Analisis Perubahan.....	19
3. Analisis Realisasi Pendapatan Perpajakan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	19
C. BELANJA KONSOLIDASIAN.....	19
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan.....	19



2. Analisis Perubahan	20
D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH TERHADAP PDRB	20
BAB V ISU / PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA	21
A. Penyaluran DAK Fisik.....	22
B. Penyaluran Dana Desa	23
C. Permasalahan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	24
D. Saran dan Rekomendasi	24
DAFTAR PUSTAKA	25



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Inflasi Bulanan (<i>mtm</i>) Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran s.d Triwulan III Tahun 2018 (%)	4
Tabel 2.1	Perbandingan Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018	7
Tabel 2.2	Jumlah Penyaluran KUR per Skema di Prov. Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018.....	10
Tabel 2.3	Jumlah Penyaluran KUR per Sektor di Prov. Papua Barat s.d Triwulan II Tahun 2018.....	11
Tabel 2.4	Jumlah Penyaluran KUR per Penyalur di Pro. Papua Barat s.d Triwulan II Tahun 2018.....	11
Tabel 2.5	Prognosis Realisasi APBN Prov. Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018	11
Tabel 3.1	Total Pagu dan Realisasi APBD Seluruh Pemda Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018	14
Tabel 3.2	Prognosis Realisasi APBN Prov. Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018	17
Tabel 4.1	Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Konsolidasi Tingkat Wilayah Papua Barat Periode Triwulan III Tahun 2018	18
Tabel 4.2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Papua Barat Triwulan III 2017 - 2018.....	19
Tabel 4.3	Perbandingan Realisasi Belanja Konsolidasian Provinsi Papua Barat Triwulan III 2017 - 2018.....	20
Tabel 4.4	Kontribusi Pemerintah Terhadap PDRB Provinsi Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018.....	20
Tabel 5.1	Pagu dan Realisasi DAK Fisik per Pemerintah Daerah di Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018.....	22
Tabel 5.2	Pagu dan Realisasi Dana Desa per Pemerintah Daerah di Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018.....	24



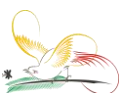
DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Kontribusi Komponen Pembentuk PDRB Papua Barat Sisi Permintaan Triwulan III Tahun 2018 (%)	2
Grafik 1.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat dan Nasional Triwulan III Tahun 2018 (yoy, %).....	2
Grafik 1.3	Perkembangan Nilai Ekspor - Impor Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018	3
Grafik 1.4	Perkembangan Inflasi Bulanan Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018 (%).....	4
Grafik 1.5	Tingkat Kemiskinan Papua Barat dan Nasional Tahun 2014 - 2018 (%).....	5
Grafik 1.6	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Papua Barat dan Nasional Tahun 2016 - 2018	5
Grafik 1.7	Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Papua Barat Tahun 2014 - 2018	6
Grafik 2.1	Penerimaan Pajak per Kab/Kota di Prov. Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018....	8
Grafik 2.2	Target dan Realisasi per Jenis Pajak di Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018.....	9
Grafik 2.3	Realisasi per Jenis PNBPN di Prov. Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018	9
Grafik 2.4	Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018	9
Grafik 2.5	Pagu dan Realisasi TKDD Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018	10
Grafik 2.6	Jumlah Penyaluran KUR per Kab/Kota di Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018..	10
Grafik 3.1	Total Pagu dan Realisasi PAD Seluruh Pemda Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018	15
Grafik 3.2	Total Target dan Realisasi PAD Seluruh Pemda Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018 dan Tahun 2017.....	16
Grafik 3.3	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer per Pemda di Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018	16
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah per Pemda di Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018.....	16
Grafik 3.5	Total Pagu dan Realisasi per Jenis Belanja Seluruh Pemda di Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018	17
Grafik 4.1	Realisasi Penerimaan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah Papua Barat s.d Triwulan III Tahun 2018	19
Grafik 5.1	Perkembangan Total TKDD Seluruh Pemda Papua Barat Tahun 2015 - 2018.....	21
Grafik 5.2	Komposisi TKDD Papua Barat Tahun 2018.....	22
Grafik 5.3	Perkembangan Total DAK Seluruh Pemda di Seluruh Pemda Papua Barat Tahun 2015 - 2018	22
Grafik 5.4	Alokasi DAK Fisik per Pemerintah Daerah di Papua Barat Tahun 2018	22
Grafik 5.5	Perkembangan Total Dana Desa Seluruh Pemda di Seluruh Pemda Papua Barat Tahun 2015 - 2018	23
Grafik 5.6	Jumlah Desa dan Rata-rata Dana Desa per Desa di Papua Barat Tahun 2015 - 2018	23



DAFTAR BOKS

Boks 1	Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan UMi (Ultra Mikro)	12
--------	--	----





Bab I

Perkembangan Ekonomi Regional

Kondisi perekonomian global menuju keseimbangan baru (*rebalancing*) seiring terjadinya perubahan fundamental kebijakan Amerika Serikat (AS). Penguatan kinerja perekonomian AS berdampak pada normalisasi kebijakan moneter berupa kenaikan suku bunga acuan sehingga terjadi peningkatan imbal hasil dan penguatan dolar AS. Implikasinya, sektor keuangan global menjadi lebih volatil disebabkan pembalikan arus modal menuju AS. Ditambah sentimen negatif dari konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga komoditas, terutama komoditas minyak mentah dunia. Seiring hal tersebut, perekonomian negara-negara berkembang pada tahun 2018 masih mengarah kepada pemulihan (*economic recovery*) meskipun lajunya mengalami moderasi jika dibandingkan tahun 2017.

Memasuki periode triwulan III 2018, kinerja perekonomian nasional tumbuh moderat didukung oleh peningkatan investasi. Sementara itu, kinerja perekonomian Papua Barat mampu tumbuh solid didukung peningkatan ekspor migas dan kenaikan konsumsi. Di saat pertumbuhan ekonomi nasional pada periode ini mencapai 5,27 persen, perekonomian Papua Barat mampu tumbuh sebesar 12,83 persen.

A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sering dijadikan ukuran terbaik untuk mengukur kinerja perekonomian (Mankiw, 2013). Terdapat tiga cara untuk menghitung PDB. Pertama, dengan menjumlahkan nilai akhir produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Kedua, dengan menjumlahkan pengeluaran agregat, yaitu jumlah dari pengeluaran konsumen, pengeluaran investasi, pembelian pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor dikurangi impor (*net export*). Ketiga, dengan menjumlahkan seluruh pendapatan faktor produksi yang diterima rumah tangga dari perusahaan (Krugman & Wells, 2011).

Untuk mengukur PDB, dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (PDB Nominal) dan harga konstan (PDB Riil). Pengukuran PDB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur perekonomian, sementara itu PDB harga konstan digunakan untuk mengukur kinerja atau pertumbuhan ekonomi suatu

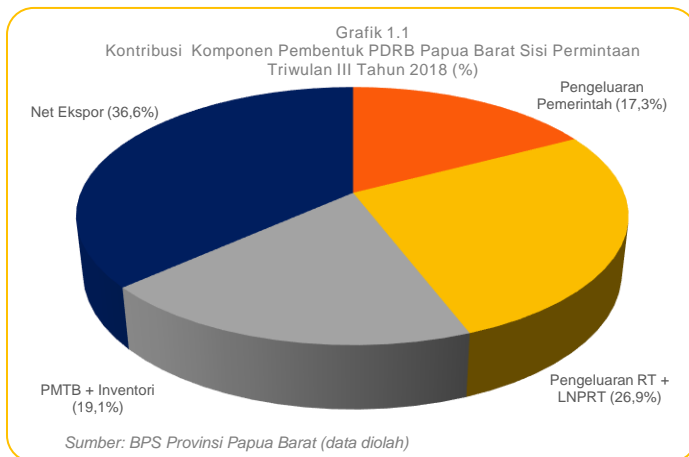


daerah. Selanjutnya PDB pada suatu region/ wilayah tertentu disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (*Gross Domestic Regional Bruto*).

A.1 Nilai PDRB

PDRB Nominal Provinsi Papua Barat pada Triwulan III 2018 mencapai Rp15,41 triliun. Dari nilai tersebut, postur perekonomian Provinsi Papua Barat didominasi oleh dua sektor lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 26,99 persen dan pertambangan/ penggalan sebesar 18,29 persen yang mengandalkan *raw material resource* berupa pengeboran dan pengilangan gas alam. Papua Barat memiliki cadangan gas alam terbesar yang diekspor ke berbagai negara.

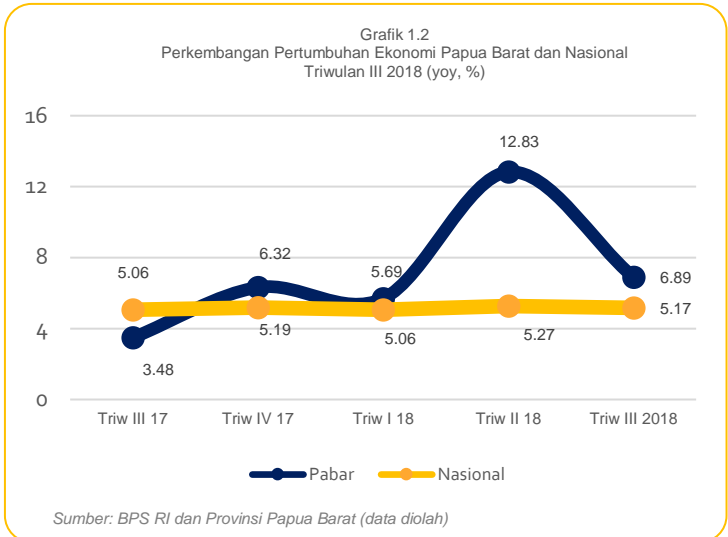
Adapun dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar PDRB Papua Barat Triwulan III 2018 berasal dari Net Ekspor sebesar 36,6 persen, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan LNPRT sebesar 26,9 persen.



A.2 Pertumbuhan PDRB

Di saat perekonomian nasional tumbuh moderat pada angka 5,17 persen, perekonomian Papua Barat pada triwulan III 2018 tumbuh solid sebesar 6,89 persen dimana seluruh sektor lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan sebesar 2,64 persen dan sektor pertambangan

penggalan sebesar 1,51 persen sejalan kenaikan harga komoditas di pasar internasional.



B. NERACA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan internasional merupakan pertukaran barang dan jasa lintas batas negara (*international border*). Dengan adanya perdagangan internasional, memungkinkan terjadinya efisiensi yang timbul dari kompetisi antar produsen dalam menjual produk dengan harga yang terendah (*competitive price*) dalam suatu proses permintaan dan penawaran (*supply and demand*) atau dalam suatu mekanisme pasar/ *market mechanism* (Seyoum, 2009).

Komponen perdagangan internasional terdiri dari ekspor dan impor. Ekspor merupakan nilai barang dan jasa yang dijual ke luar negeri, sedangkan impor merupakan nilai barang dan jasa yang disediakan untuk dalam negeri. Selisih keduanya merupakan net ekspor atau biasa disebut juga sebagai neraca perdagangan internasional.

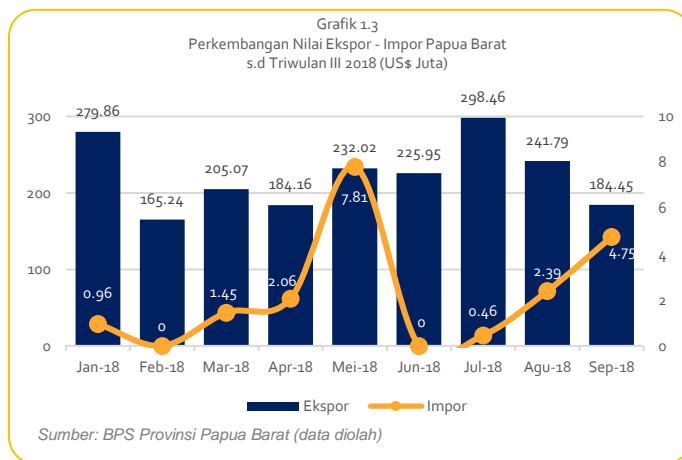
Sampai dengan triwulan III 2018, ekspor Papua Barat tercatat sebesar US\$2.700 juta atau tumbuh sebesar 44,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Nilai ekspor tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar US\$ 298,46 juta sedangkan nilai



ekspor terendah terjadi pada bulan Februari sebesar US\$ 165,24 juta. Komoditas ekspor Papua Barat terbesar yaitu *raw material resources* berupa gas alam dan minyak bumi, dengan kontribusi mencapai 98 persen dari total nilai ekspor yang ada. Adapun komoditas ekspor lainnya berupa perhiasan/ permata, kayu, barang dari kayu, garam, belerang, kapur (semen), ikan, udang, daging, ikan olahan, sabun dan preparat pembersih.

Sementara itu, sampai dengan triwulan III 2018 nilai impor Papua Barat mencapai US\$ 19,88 juta atau naik 582 persen dari periode yang sama tahun 2017. Nilai impor tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar US\$ 7,81 juta. Sementara itu pada bulan Februari dan Juni, Papua Barat tidak melakukan impor. Adapun komoditas impor Papua Barat berupa kapal laut, mesin-mesin/ pesawat mekanik, mesin/ peralatan listrik, serta benda-benda dari besi dan baja.

Dari selisih antara nilai ekspor dan impor, sampai dengan triwulan III 2018, nilai neraca perdagangan internasional Papua Barat tercatat surplus sebesar US\$ 1.997,12 juta.



C. INFLASI

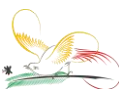
Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum (Mankiw, 2013). Jika kenaikan harga barang hanya berasal dari satu atau dua barang saja, maka tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas dan menyebabkan kenaikan harga

barang lainnya. Secara umum, inflasi digolongkan ke dalam tiga jenis yaitu: inflasi inti (*core inflation*), inflasi makanan yang bergejolak (*volatile food inflation*) dan inflasi harga yang diatur (*administered price inflation*).

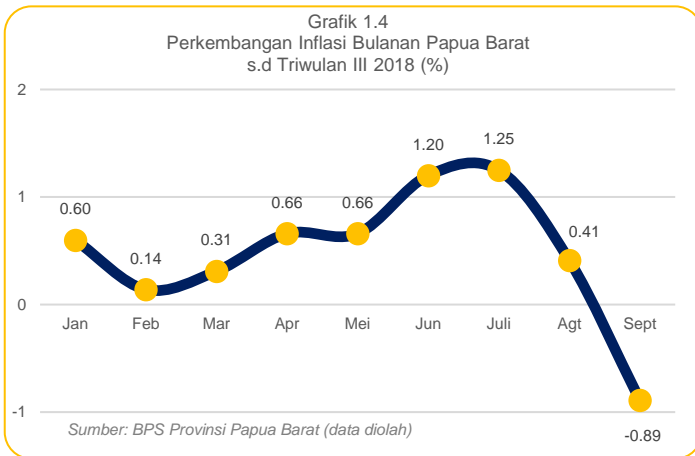
Laju inflasi Papua Barat pada triwulan III 2018 (Januari – September) relatif terkendali yaitu pada level 4,4 persen (*ytd*), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017, namun masih pada rentang target inflasi nasional sebesar $3,5 \pm 1$ persen. Tekanan inflasi pada periode ini terutama dipengaruhi komponen *volatile food* (kelompok bahan makanan yang bergejolak). Faktor intensitas curah hujan dan gelombang laut yang relatif tinggi berdampak pada pasokan bahan makanan dan jalur distribusi. Disamping itu, komponen *administered price* sedikit mengalami tekanan, imbas dari kenaikan harga komoditas minyak mentah di pasar internasional yang berdampak pada peningkatan harga BBM non-subsidi (*non-premium*). Sementara itu, tekanan inflasi pada kelompok inti (*core inflation*) relatif terkendali.

Pada triwulan pertama tahun 2018 (Januari – Maret) laju inflasi Papua Barat berada pada level 1,05 persen (*ytd*) dengan penyumbang terbesar terjadi pada kelompok *volatile food* seperti beras, telur, susu, daging, ikan segar, dan kacang-kacangan. Faktor intensitas curah hujan tinggi yang menyebabkan beberapa daerah penghasil mengalami gagal panen berakibat pasokan komoditas menjadi berkurang. Di samping itu, kondisi laut pasang menyebabkan terganggunya jalur distribusi. Sementara itu, komponen *administered price* sedikit tertekan disebabkan kenaikan harga bahan bakar non-subsidi (pertalite dan pertamax series) mengikuti peningkatan harga minyak mentah dunia. Namun, laju inflasi komponen ini relatif terkendali seiring kelompok transportasi yang mengalami deflasi.

Pada triwulan kedua tahun 2018 (April – Juni), intensitas curah hujan di Papua Barat mulai berkurang. Faktor tersebut mendukung produktivitas hasil pertanian sehingga pasokan



komoditas menjadi berlimpah. Dampaknya, pada bulan April dan Mei komponen *volatile food* seperti beras, sayur-sayuran dan kacang-kacangan mengalami deflasi. Pada bulan April, komoditas sayur-sayuran dan kacang-kacangan mengalami deflasi masing-masing sebesar -2,52 persen dan -2,65 persen. Kemudian pada bulan Mei, komoditas beras dan umbi-umbian mengalami deflasi sebesar -0,81 persen.



Memasuki bulan puasa dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Papua Barat dihadapkan pada tekanan inflasi yang cukup dalam. Komponen *volatile food* seperti telur, daging ayam, daging sapi mengalami tren peningkatan harga seiring kenaikan permintaan. Pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan pengawasan distribusi untuk mencegah penimbunan barang dan permainan harga. Selain itu, TPID juga melakukan operasi pasar dan program pasar murah untuk menjaga stabilitas harga. Sementara itu, komponen *administered price* pada periode ini juga mengalami tekanan. Kelompok transportasi berupa kenaikan tarif maskapai penerbangan untuk keperluan liburan sekolah dan mudik lebaran menyumbang inflasi cukup signifikan sebesar 1,52 persen.

Memasuki triwulan ketiga tahun 2018, Papua Barat masih dihadapkan pada tekanan inflasi meskipun intensitasnya mulai berkurang. Pada bulan Juli, inflasi Papua Barat mencapai level 1,25 persen. Komponen *volatile food* dan transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi dimana intensitas

curah hujan tinggi dan belum berakhirnya masa liburan sekolah menjadi faktor penyebab utama. Kemudian pada bulan Agustus, laju inflasi Papua Barat mencapai level 0,41 persen dimana kelompok bahan makanan menjadi penyumbang terbesar. Pada bulan ini, di saat semua kelompok pengeluaran mengalami tekanan inflasi, kelompok transportasi mengalami deflasi seiring berakhirnya masa liburan sekolah. Berbeda dari bulan-bulan sebelumnya, memasuki bulan September, Papua Barat mengalami deflasi pada level -0,89 persen. Kelompok *volatile food* seperti daging, telur, susu, dan sayur-sayuran serta kelompok inti (*core inflation*) seperti sandang dan perlengkapan rumah tangga menjadi penyumbang terbesar deflasi. Di samping itu, kelompok transportasi ikut menyumbang deflasi seiring memasuki masa *low season*.

Tabel 1.1
Inflasi (m/m) Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran
s.d Triwulan III 2018 (%)

No	Kelompok Pengeluaran	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sept
	Umum	0.60	0.14	0.31	0.66	0.66	1.20	1.25	0.41	-0.89
1	Bahan Makanan	1.20	0.21	0.13	1.19	0.72	2.95	1.97	1.30	-2.67
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakak	0.60	1.44	1.01	0.58	0.50	0.43	0.82	0.57	0.10
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	0.05	0.40	0.17	0.05	0.09	-0.13	0.41	0.10	0.31
4	Sandang	-0.18	0.77	1.76	0.31	0.64	-0.16	0.28	0.79	-0.71
5	Kesehatan	0.15	0.26	0.14	-0.02	0.61	0.39	0.74	0.00	0.15
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	0.00	1.93	0.77	0.08	0.25	-0.05	-0.04	0.38	0.06
7	Transpor dan Komunikasi dan Jasa Keuangan	0.67	-2.23	-0.36	0.97	1.68	1.07	2.12	-1.30	-0.03

Sumber: BPS Prov. Papua Barat (data diolah)

D. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Indikator pembangunan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat diantaranya: Tingkat Kemiskinan, Tingkat Ketimpangan (*Gini Ratio*), dan Tingkat Pengangguran.

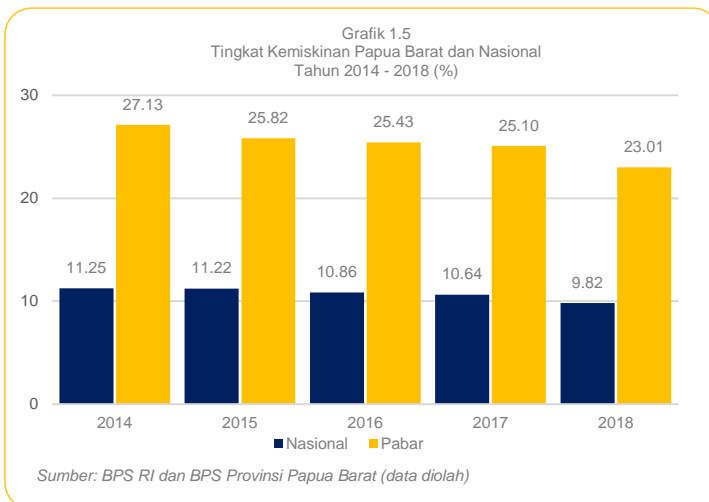
D.1 Tingkat Kemiskinan

Sebagaimana terjadi pada sebagian daerah, Provinsi Papua Barat dihadapkan pada masalah kemiskinan yang cukup pelik. Tingkat kemiskinan Papua Barat sangat tinggi, menduduki peringkat kedua nasional setelah Provinsi Papua.



Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan Provinsi Papua Barat mencapai 25,43 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,86 persen. Kemudian pada tahun 2018, di saat kemiskinan nasional berhasil turun menjadi *single digit*, tingkat kemiskinan Papua Barat turun menjadi 23,01 persen. Selama beberapa periode ke belakang penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat belum begitu signifikan. Pembangunan yang berlangsung selama ini di Papua Barat tampaknya belum berhasil meningkatkan taraf hidup penduduk keluar dari kemiskinan.

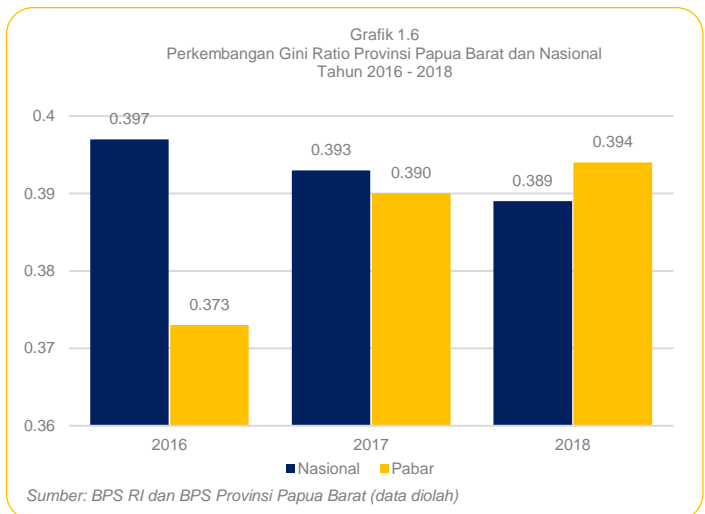
Berbeda dengan nasional, tingkat distribusi pendapatan Papua Barat dari tahun 2016 - 2018 semakin timpang, ditandai dengan nilai *gini ratio* yang tercatat semakin tinggi. Pada tahun 2016, *gini ratio* Papua Barat sebesar 0,373. Kemudian nilainya semakin naik menjadi 0,390 pada tahun 2017. Padahal selama dua tahun tersebut, *gini ratio* Papua Barat di bawah pencapaian nasional. Selanjutnya pada tahun 2018, *gini ratio* Papua Barat kembali naik menjadi 0,394.



D.2 Tingkat Ketimpangan

Tidak diragukan lagi bahwa pembangunan mengharuskan adanya tingkat pendapatan yang tinggi dan pertumbuhan berkelanjutan. Namun demikian, tingkat pendapatan yang tinggi perlu didukung oleh indikator utama lainnya yaitu pemerataan distribusi pendapatan. Jika peningkatan pendapatan tersebut hanya melibatkan sebagian kecil orang kaya, maka penanggulangan kemiskinan akan bergerak melambat dan ketimpangan semakin tinggi.

Salah satu cara untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan dengan menggunakan Rasio Gini (*Gini Ratio*). Rasio tersebut menggambarkan derajat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu daerah yang nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) dan 1 (ketidakmerataan sempurna).



D.3 Tingkat Pengangguran

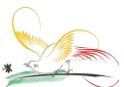
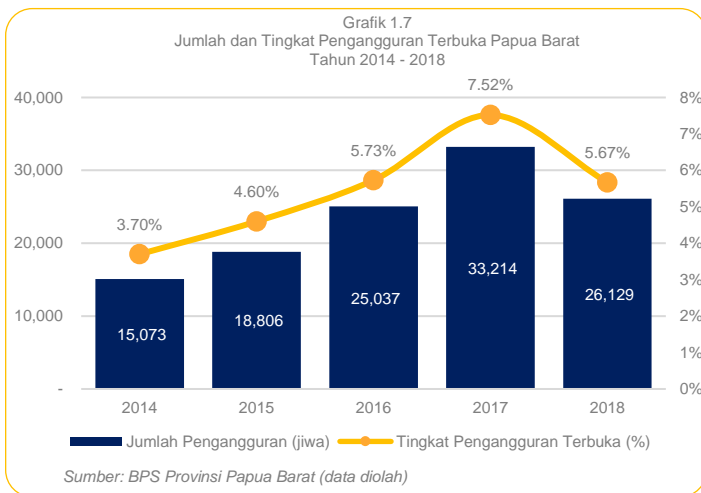
Secara teoritis, pengangguran memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, hal tersebut mencerminkan penambahan output yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memenuhi kapasitas produksi. Arthur Okun (Okun's Law) melalui studinya menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran akan semakin berkurang (Blanchard, 2006).

Di saat jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran nasional mengalami kenaikan, jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran Papua Barat justru bergerak turun. Pada tahun 2017 jumlah pengangguran Papua Barat mencapai 33.214 orang dengan tingkat pengangguran sebesar 7,52 persen. Kemudian pada tahun 2018, jumlah pengangguran Provinsi Papua Barat



berkurang menjadi 26.219 orang dengan tingkat pengangguran juga berkurang menjadi 5,67 persen.

Tampaknya program pemerintah dalam perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan mampu menekan jumlah dan tingkat pengangguran di Papua Barat. Untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah daerah dapat menciptakan kesempatan kerja melalui peningkatan keahlian, sertifikasi, pendirian tempat latihan ketrampilan, magang serta meningkatkan inventasi yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.



Bab II

Perkembangan dan Analisis APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menggambarkan kondisi keuangan pemerintah yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan dan alokasi belanja pemerintah untuk satu periode tahun anggaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sebagai gambaran implementasi APBN tahun 2018 sampai dengan triwulan III di Provinsi Papua Barat, dapat dijelaskan dengan membandingkan

antara pagu dan realisasi APBN triwulan III tahun 2017 dengan triwulan III tahun 2018.

Target pendapatan negara tahun 2018 di Papua Barat mengalami penurunan sebesar 20,5 persen dibandingkan target tahun 2017, yaitu dari Rp3.437,4 miliar menjadi Rp2.850,4 miliar. Penurunan target tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kondisi perekonomian pada tahun 2018 masih dalam tahap pemulihan (*economic recovery*). Tantangan dan dinamika yang cukup berat mengingat volatilitas harga komoditas internasional seperti minyak dan gas bumi turut mempengaruhi target penerimaan pajak di Papua Barat.

Sementara itu, dari aspek belanja negara terdapat kenaikan pagu tahun 2018 sebesar 3,11 persen dibandingkan pagu tahun 2017, yaitu dari Rp23.105,0 miliar menjadi Rp23.823,6 miliar. Alokasi belanja APBN 2018 yang naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh peningkatan kebutuhan anggaran di daerah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Negara/Lembaga dan belanja daerah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Hal ini tercermin dari kenaikan yang cukup

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Papua Barat
s.d Triwulan III 2018 dan 2017

Uraian	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Pagu	Realisasi Triw III	%	Pagu	Realisasi Triw III	%
A. PENDAPATAN NEGARA	3,437.4	1,398.6	40.7	2,850.4	1,427.3	50.1
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	3,437.4	1,398.6	40.7	2,850.4	1,427.3	50.1
1. Penerimaan Pajak	3,061.9	1,208.4	39.5	2,586.1	1,222.0	47.3
2. PNPB	375.4	190.2	50.7	264.3	205.3	77.7
II. HBAH	0	0	0	0	0	0.0
B. BELANJA NEGARA	23,105.0	16,176.4	70.0	23,823.6	16,597.9	69.7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	6,415.5	3,733.0	58.2	6,894.2	3,914.4	56.8
1. Belanja Pegawai	1,373.4	942.0	68.6	1,442.9	1,052.9	73.0
2. Belanja Barang	2,029.1	1,204.7	59.4	2,727.7	1,502.3	55.1
3. Belanja Modal	2,979.3	1,576.0	52.9	2,684.8	1,344.2	50.1
4. Belanja Bantuan Sosial	19.7	10.1	51.3	24.9	12.4	49.8
5. Belanja Lain-lain	14.0	0.2	1.5	14.0	2.7	19.3
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	16,689.5	12,443.4	74.6	16,929.4	12,683.4	74.9
1. Transfer ke Daerah	15,325.1	11,521.7	75.2	15,599.7	11,846.8	75.9
a. Dana Perimbangan	11,975.8	9,386.7	78.4	11,590.7	8,723.4	75.3
1) Dana Alokasi Umum	7,954.1	6,621.2	83.2	8,024.8	6,678.8	83.2
2) Dana Bagi Hasil	2,210.0	1,783.0	80.7	1,323.5	879.3	66.4
3) Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik)	1,811.7	982.5	54.2	2,242.5	1,165.3	52.0
b. Dana Otonomi Khusus & DID	3,349.3	2,135.1	63.7	4,008.9	3,123.4	77.9
c. Dana Keistimewaan Yogyakarta	0	0	0	0.0	0	0.0
d. Dana Transfer Lainnya	0	0	0	0.0	0	0.0
2. Dana Desa	1,364.4	921.6	67.5	1,329.7	836.7	62.9
C. SURPLUS DEFISIT	-19,667.6	-14,777.8	75.1	-20,973.2	-15,170.6	72.3

Sumber: KPP Manokwari, KPP Sorong, SPAN, SIMTRADA DJPK, dan Rincian Dana Transfer dan Dana Desa (data diolah)



signifikan pada pagu belanja barang sebesar 34,4 persen yaitu dari Rp2.029,1 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp2.727,7 miliar pada tahun 2018.

Di samping itu, penambahan komponen pembayaran THR PNS tahun ini yang berakibat pada kenaikan pagu belanja pegawai, turut andil dalam peningkatan pagu belanja APBN secara keseluruhan. Berbeda dari tahun sebelumnya, pembayaran THR PNS tahun 2018 ditambahkan komponen tunjangan keluarga, tunjangan tambahan dan tunjangan kinerja. Pada tahun 2018, pagu belanja pegawai naik sebesar 5,06 persen yaitu dari Rp1.373,4 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp1.442,9 miliar pada tahun 2018.

Sementara itu, terdapat penurunan yang cukup signifikan pada pagu belanja modal dari Rp2.979,3 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp2.684,8 miliar pada tahun 2018 atau turun sebesar 10,96 persen. Hal ini disebabkan proyek-proyek infrastruktur strategis di Papua Barat memasuki tahap akhir penyelesaian.

Selanjutnya, dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dan belanja sampai dengan triwulan III 2018, dapat disimpulkan bahwa terdapat defisit anggaran sebesar Rp8.956,3 miliar yang disebabkan target penerimaan yang belum tercapai. Sampai dengan triwulan III 2018, realisasi penerimaan APBN relatif masih rendah mencapai 28,11 persen. Namun kinerja tersebut masih lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Sementara itu, realisasi belanja APBN mencapai 41 persen dimana kinerjanya relatif sama dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

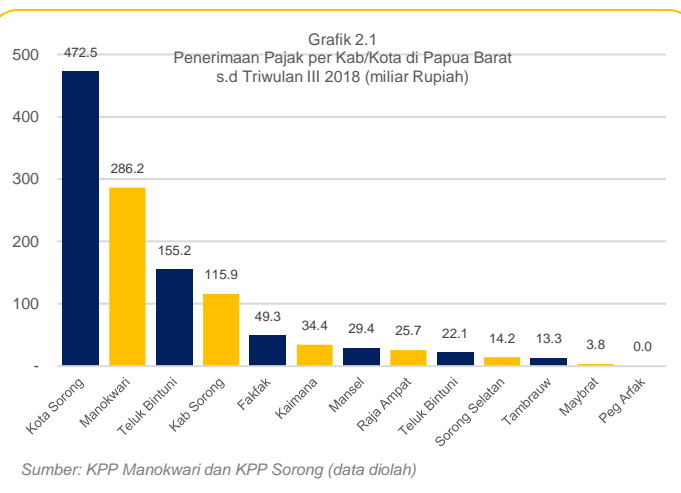
A. PENDAPATAN NEGARA

A.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan di Papua Barat hanya berasal dari penerimaan pajak dalam negeri yang terdiri atas penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya.

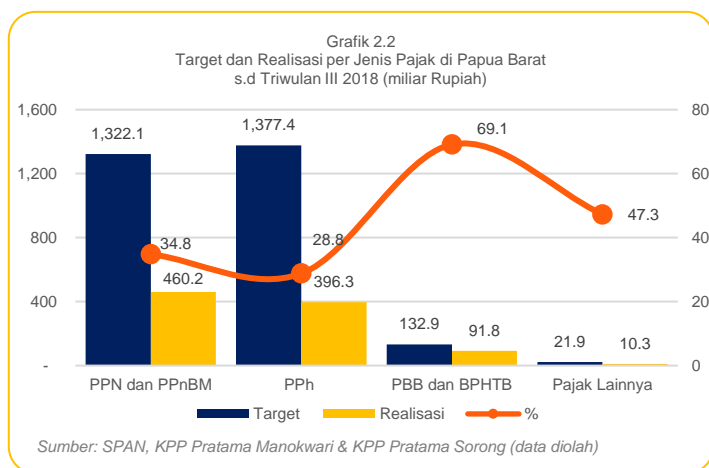
Penerimaan perpajakan di Papua Barat sampai dengan triwulan III 2018 berjumlah Rp1,22 triliun. Pada periode ini, daerah yang memiliki penerimaan pajak terbesar yaitu Kota Sorong, Kab. Manokwari dan Kab. Teluk Bintuni masing-masing sebesar Rp472,5 miliar, Rp286,2 miliar dan Rp155,2 miliar. Sebagai pusat perekonomian di Papua Barat, Kab. Manokwari dan Kota Sorong merupakan daerah yang paling maju sehingga banyak potensi penerimaan pajak yang diperoleh dari kedua daerah tersebut. Adapun Kab. Teluk Bintuni merupakan salah satu daerah penghasil gas alam terbesar dalam skala nasional.



Sementara itu, daerah-daerah lain di Papua Barat memiliki penerimaan pajak relatif kecil. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa penerimaan pajak terendah terdapat pada Kab. Maybrat sebesar Rp3,8 miliar dan Kab. Pegunungan Arfak yang sama sekali belum terdapat penerimaan perpajakan. Sebagai daerah pemekaran baru, Kab. Pegunungan Arfak belum mempunyai sumber pajak potensial di daerahnya. Adapun Kab. Maybrat merupakan daerah yang relatif tertinggal, sehingga memerlukan perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan potensi perekonomiannya.

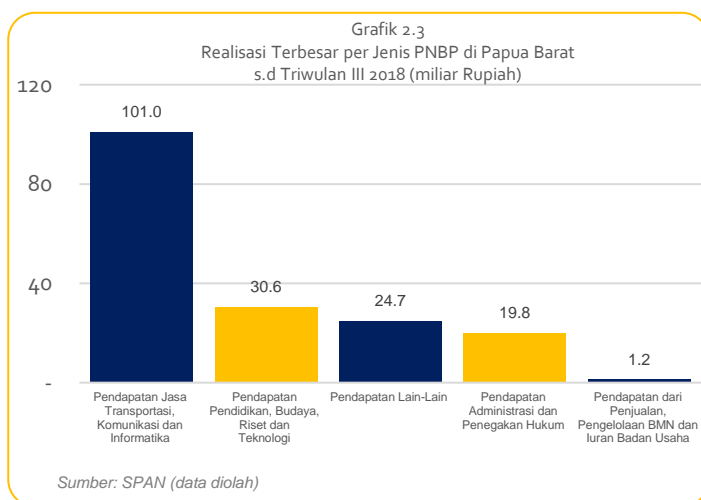


Berdasarkan jenisnya, sampai dengan triwulan III 2018 realisasi penerimaan pajak terbesar di Papua Barat adalah PPN dan PPnBM yang mencapai Rp460,24 miliar atau 34,8 persen dari target, dengan kontribusi terbesar yaitu PPN Dalam Negeri mencapai Rp453,89. Kemudian realisasi penerimaan pajak terbesar kedua yaitu Pajak Penghasilan sebesar Rp396,18 miliar atau 28,8 persen dari target, dengan kontribusi terbesar PPh Pasal 21 mencapai Rp184,4 miliar.



A.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan. Realisasi PNBP di Papua Barat sampai dengan triwulan III 2018 mencapai Rp205,31 miliar (76,5 persen dari target), lebih baik dari periode yang sama tahun 2017. Kontribusi terbesar pada



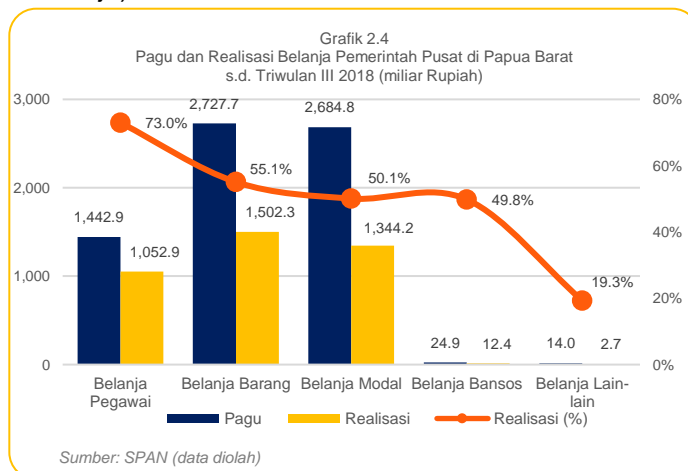
periode ini didapat dari sektor jasa transportasi yaitu pendapatan jasa kepelabuhanan sebesar Rp58,3 miliar dan pendapatan jasa kebandarudaraan sebesar Rp32,05miliar.

B. BELANJA NEGARA

Sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah (*government expenditure*) dapat dijadikan sebagai alat unkit (*leverage*) dalam bentuk stimulus fiskal. Kebijakan penganggaran pada K/L untuk wilayah Papua Barat diprioritaskan dengan mengakselerasi belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur.

B.1 Belanja Pemerintah Pusat

Total pagu belanja pemerintah pusat di Papua Barat mengalami kenaikan sebesar 7,46 persen, yaitu dari Rp6.415,5 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp6.894,2 miliar pada tahun 2018. Alokasi tertinggi dimiliki belanja barang mencapai Rp2.727 miliar (39,55 persen dari total pagu belanja) dan belanja modal sebesar Rp2.684,8 miliar sebesar Rp2.198,62 miliar (38,93 persen dari total pagu belanja).



Sampai dengan triwulan III 2018, realisasi belanja tertinggi yaitu belanja pegawai mencapai 73,0 persen dan belanja barang mencapai 55,1 persen. Sementara itu, realisasi belanja modal mencapai 50,1 persen dan belanja bantuan sosial mencapai

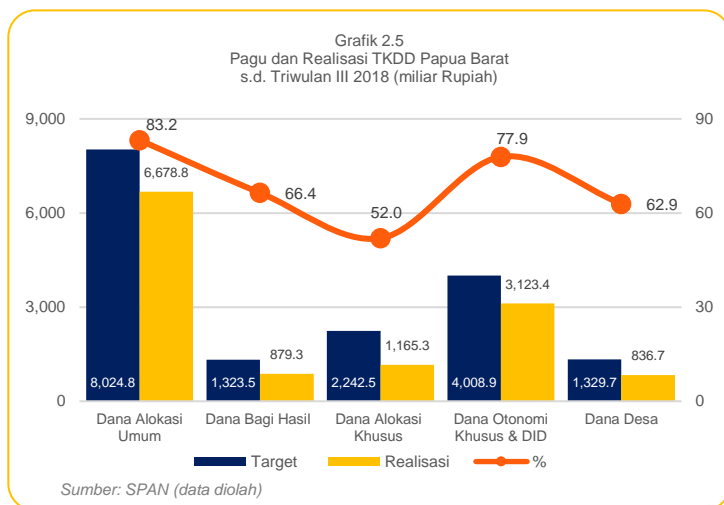


49,8 persen. Adapun realisasi belanja terendah yaitu belanja lain-lain yang baru mencapai 19,3 persen.

B.2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Total pagu alokasi TKDD yang diperuntukkan bagi seluruh pemerintah daerah di Papua Barat mengalami kenaikan sebesar 1,44 persen yaitu dari Rp16,69 triliun pada tahun 2017, menjadi Rp16,93 triliun miliar pada tahun 2018. Alokasi anggaran terbesar terdapat pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp8,02 triliun (47,4 persen dari total pagu alokasi TKDD).

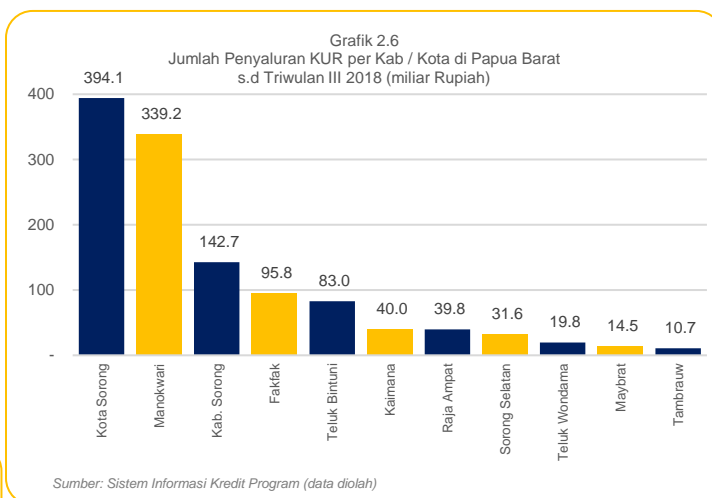
Sampai dengan triwulan III 2018, realisasi TKDD di Papua Barat mencapai Rp12,68 triliun atau 74,9 persen dari total pagu alokasi TKDD. Realisasi TKDD tertinggi yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Desa masing-masing mencapai 83,2 persen dan 62,9 persen. Adapun realisasi terendah yaitu Dana Alokasi Khusus sebesar 52,0 persen.



B.3 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), sampai dengan triwulan III 2018 jumlah penyaluran KUR di Provinsi Papua Barat sebesar Rp1,21 triliun yang diberikan kepada 37.774 debitur. Daerah dengan jumlah penyaluran KUR terbesar yaitu Kota Sorong sebesar Rp394,1 miliar

dengan jumlah debitur sebanyak 11.877 nasabah. Selanjutnya, daerah dengan penyaluran KUR terbesar kedua yaitu Kab. Manokwari sebesar Rp339,2 miliar yang diberikan kepada 10.392 debitur. Kemudian penyaluran KUR terbesar ketiga yaitu Kab. Sorong sebesar Rp142,1 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 4.707 nasabah. Hal ini mengindikasikan bahwa persebaran penerima KUR di Papua Barat sebagian besar berada di daerah yang kondisi perekonomiannya relatif lebih maju.



Jika dilihat per skema penyaluran, sampai dengan triwulan III 2018 jumlah penyaluran KUR tertinggi di Papua Barat yaitu KUR Mikro sebesar Rp735,14 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 34.859 nasabah. Sementara itu untuk penyaluran KUR Ritel sebesar Rp475,72 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 2.870 nasabah. Adapun penyaluran KUR TKI sebesar 132 juta dengan jumlah debitur sebanyak 4 (empat) orang nasabah.

Tabel 2.2
Jumlah Penyaluran KUR per Skema di Prov. Papua Barat s.d. Triwulan III 2018

No	Skema	Akad	Oustanding	Jumlah Debitur	Rata-Rata per Debitur
1	Mikro	735.145.259.000	320.224.459.322	34.859	21.089.109
2	Ritel	475.715.767.307	286.164.964.007	2.870	165.754.623
3	TKI	132.000.000	100.649.067	4	33.000.000
4	UMI	367.900.000	184.515.284	41	8.973.171
Jumlah		1.211.360.926.307	606.674.587.680	37.774	32.068.643

Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (data diolah)



Jika dilihat per sektor, perdagangan merupakan sektor yang memiliki jumlah penyaluran KUR terbesar. Sampai dengan triwulan III 2018, penyalurannya sebesar Rp846,38 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 26.177 nasabah. Kemudian diikuti sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp83,53 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 3.319 nasabah. Melihat kondisi tersebut, perlu perluasan jangkauan ke sektor lainnya yang lebih produktif seperti sektor perikanan dan industri pengolahan. Hal ini dikarenakan perluasan kepada sektor produktif lebih menggerakkan roda perekonomian Papua Barat.

Tabel 2.3
Jumlah Penyaluran KUR per Sektor di Prov. Papua Barat
s.d Triwulan III 2018

No	Skema	Akad	Oustanding	Jumlah Debitur	Rata-Rata per Debitur
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	83.538.100.000	48.961.806.257	3.319	25.169.660
2	Perikanan	46.816.100.001	26.378.621.519	1.383	33.851.121
3	Industri Pengolahan	41.129.000.000	22.440.161.129	984	41.797.764
4	Konstruksi	2.250.000.000	1.539.048.965	5	450.000.000
5	Perdagangan Besar dan Eceran	846.381.643.413	410.625.447.085	26.177	32.333.027
6	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan	52.795.200.000	27.825.787.379	1.352	39.049.704
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	50.688.582.893	23.474.366.989	1.936	26.182.119
8	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa	28.949.000.000	15.167.564.318	722	41.480.609
9	Jasa Pendidikan	318.000.000	89.432.735	16	19.875.000
10	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, dan Hiburan	49.485.300.000	26.633.022.752	1.662	29.774.549
11	Administrasi Pemerintahan, dan Pertahanan	3.267.000.000	1.753.293.176	43	75.976.744
12	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.105.000.000	191.754.584	6	184.166.667
13	Lainnya	3.638.000.000	1.594.280.792	169	21.526.627
	Jumlah	1.211.360.926.307	606.674.587.680	37.774	32.068.643

Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (data diolah)

Jika dilihat dari lembaga penyalur, terdapat enam bank penyalur KUR di Papua Barat yaitu BRI, Mandiri, BNI, BRI Syariah, BPD Papua dan Bank Artha Graha. BRI merupakan bank penyalur KUR terbesar baik dari sisi jumlah debitur maupun jumlah kredit yang disalurkan. Sampai dengan triwulan III 2018, dana KUR yang telah disalurkan oleh BRI sebesar Rp939,2 miliar dengan jumlah debitur mencapai 33.672 orang. Sementara itu, dana KUR yang telah disalurkan oleh Bank Mandiri sebesar Rp123,7 miliar dengan jumlah debitur mencapai 3.069 orang. Adapun BNI telah menyalurkan KUR sebesar Rp139,7 miliar dengan jumlah debitur mencapai 801 orang.

Tabel 2.4
Jumlah Penyaluran KUR per Penyalur di Prov. Papua Barat
s.d Triwulan III 2018

No	Penyalur	Akad	Oustanding	Jumlah Debitur	Rata-Rata per Debitur
1	BRI	939.275.665.413	456.634.197.307	33.672	27.894.858
2	Mandiri	123.702.278.000	61.723.308.764	3.069	40.307.031
3	BNI	139.714.082.893	80.307.163.342	801	174.424.573
4	BPD Papua	8.216.000.001	7.733.207.690	187	43.935.829
5	BRI Syariah	60.000.000	41.527.341	3	20.000.000
6	Artha Graha	25.000.000	17.402.052	1	25.000.000
7	LKBB-UMI	367.900.000	217.781.184	41	8.973.171
	Jumlah	1.211.360.926.307	606.674.587.680	37.774	32.068.643

Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (data diolah)

C. PROGNOSIS REALISASI APBN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2018

Sampai dengan akhir tahun 2018, diperkirakan terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi pencapaian realisasi APBN di Provinsi Papua Barat, yaitu:

- ✚ Perekonomian global mulai memasuki keseimbangan baru (*rebalancing*) akibat pulihnya perekonomian negara maju;
- ✚ Kapasitas SDM relatif kurang memadai sehingga perencanaan anggaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- ✚ Mutasi/ pergantian pejabat perbendaharaan;
- ✚ Mindset satuan kerja yang biasa mencairkan anggaran di akhir tahun.

Berdasarkan trend dua tahun terakhir (2016-2017) serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian realisasi APBN di Provinsi Papua Barat, maka dapat diperkirakan realisasi APBN 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Prognosis Realisasi APBN Provinsi Papua Barat
s.d. Triwulan IV 2018

Uraian	Pagu	Realisasi s.d Triw III		Perkiraan s.d. Triw IV	
		Rp	% Real thd Pagu	Rp	% Real thd Pagu
PENDAPATAN NEGARA	2.850,4	1.427,3	50,1	2.344,5	82,25
BELANJA NEGARA	23.823,6	16.597,9	69,7	23.466,3	98,50
SURPLUS DEFISIT		-15.170,6	72,3	-21.121,8	

(miliar Rupiah)



Berdasarkan tabel prognosis realisasi APBN tersebut, dapat dijelaskan bahwa setelah melihat beberapa tantangan perekonomian global, diperkirakan sulit bagi Papua Barat untuk mengembangkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, sampai dengan akhir tahun 2018, penerimaan APBN di Papua Barat diperkirakan hanya dapat mencapai 82,25 persen.

Melihat tren tahun 2016 dan 2017 dimana realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat berkisar diangka 98 persen, maka perkiraan realisasi sampai akhir tahun 2018 dapat mencapai angka 98,5 persen.

Boks 2.1

Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan UMi (Ultra Mikro)

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang penting dalam perekonomian. Perannya menjadi vital karena mampu bertahan dari guncangan ekonomi (Wengel and Rodriguez, 2006, dan Funabashi, 2013). Ditambah lagi, UMKM lebih mampu bertahan dari krisis dibandingkan perusahaan besar dan merespon lebih cepat/ fleksibel terhadap perubahan yang terjadi di luar (Berry et al., 2001). Berry et al. (2002) mengemukakan bahwa UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran. Data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 57,8 juta. Dari jumlah tersebut, UMKM mampu menyerap 110,2 juta tenaga kerja dan memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp 4.202,9 trilyun atau setara 46,62 persen dari total PDB.

Di samping kelebihan yang dimilikinya, UMKM memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya keuangan, membayar suku bunga yang lebih tinggi, dan kelemahan lainnya (Bourletidis and Triantafyllopoulos, 2014). Oleh karena itu, Chittithaworn, et al. (2011) menyarankan adanya bantuan berupa pembiayaan bagi UMKM. Khan (2015) menambahkan pentingnya peran lembaga keuangan bagi pertumbuhan usaha UMKM.

Pembiayaan KUR

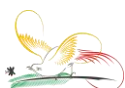
Di Indonesia, permasalahan utama yang dihadapi UMKM yaitu sulitnya mendapat akses pembiayaan dari perbankan. Sehingga dari sisi ini, pemerintah hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Diantara program yang saat ini dijalankan pemerintah untuk membantu UMKM yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini merupakan pembiayaan kredit yang berasal dari lembaga perbankan dimana pemerintah membantu melalui pemberian subsidi bunga. Pemerintah menanggung selisih antara tingkat bunga yang diterima perbankan dan bunga yang dibebankan kepada penerima KUR.

Sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016, KUR terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu KUR Mikro, KUR Ritel dan KUR TKI (Tenaga Kerja Indonesia). KUR Mikro diberikan kepada penerima KUR paling banyak dengan jumlah Rp25 juta dengan jangka waktu kredit untuk modal kerja paling lama 3 tahun atau investasi paling lama 5 tahun. KUR Ritel diberikan kepada debitur KUR dengan jumlah antara Rp25 juta – Rp500 juta dengan jangka waktu kredit untuk modal kerja paling lama 4 tahun atau investasi paling lama 5 tahun. Adapun KUR TKI diberikan kepada penerima KUR paling banyak Rp25 juta dengan jangka waktu kredit paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 tahun.

Saat ini, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memiliki sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran KUR. Sistem elektronik tersebut dinamakan dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Melalui SIKP dapat diketahui data penerima KUR (*Know Your Customers*) berupa jumlah dan profil debitur, validitas debitur, serta statistik penyaluran KUR.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pemberdayaan UMKM. Dalam konteks pembiayaan melalui program KUR, selama ini hanya perbankan yang mencari calon debitur KUR sehingga pemberian kredit tersebut diragukan ketepatan sarannya. Bisa jadi, debitur yang menerima fasilitas KUR bukan merupakan UMKM yang layak untuk dibiayai. Oleh karena itu, Pemda memiliki peran yang vital untuk mendata dan mengidentifikasi calon debitur potensial (UMKM) yang layak untuk dibiayai.

Hingga saat ini, peran pemerintah daerah di Papua Barat bisa dikatakan belum maksimal untuk mendata calon nasabah KUR potensial. Seharusnya pemerintah daerah di Papua barat lebih aktif untuk mendata calon nasabah karena dipandang lebih mengetahui kondisi UMKM di daerahnya yang layak untuk diberikan pembiayaan melalui program KUR. Jika pemerintah daerah telah memiliki data calon nasabah yang layak, pemerintah daerah kemudian dapat memasukkan data UMKM tersebut ke dalam SIKP. Data yang telah dimasukkan, kemudian digunakan perbankan untuk melakukan penyeleksian calon nasabah KUR.



Survey Pelaksanaan KUR di Papua Barat

Dalam rangka mengukur efektivitas penyaluran KUR di Papua Barat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat telah melakukan survey kepada debitur KUR. Selain itu, survey tersebut juga bertujuan untuk melihat validitas data debitur KUR dan dampak pelaksanaan program KUR bagi perekonomian. Survey dilakukan dengan wawancara langsung kepada penerima KUR menggunakan kuisioner yang telah disusun. Dengan mempertimbangkan keterbatasan dana dan SDM, pemilihan sampel penerima KUR sebagai responden dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan *quota sampling*. Metode *purposive sampling* digunakan untuk menentukan lokasi responden yang akan disampel karena pemilihan tempat harus berdasarkan pertimbangan yang logis, sedangkan *quota sampling* digunakan untuk menentukan dan membatasi jumlah sampel yang akan diambil. Responden yang diwawancarai pada kegiatan monev ini sebanyak 90 debitur yang tersebar di 3 (tiga) kota yaitu Kota Sorong, Kab. Manokwari dan Kab. Sorong.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Responden yang disurvei telah sesuai dengan database SIKP;
2. Program KUR yang diluncurkan oleh pemerintah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari antusiasme para responden yang menginginkan agar program ini terus berlanjut di masa yang akan datang;
3. Dengan adanya program KUR, modal usaha bagi UMKM dapat meningkat sehingga terdapat peningkatan keuntungan usaha dan perluasan sektor usaha;
4. Proses pencairan KUR kepada debitur pada umumnya relatif mudah dan cepat;
5. Tidak ada diskriminasi gender dalam penyaluran KUR selama debitur tersebut memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan;
6. Tingkat kepuasan masyarakat penerima KUR di Papua Barat cukup tinggi, disebabkan oleh:
 - a. Suku bunga yang dibayar debitur KUR cukup rendah, yaitu 7 persen per tahun untuk akad tahun 2018 dan 9 persen per tahun untuk akad tahun sebelumnya;
 - b. Proses pengajuan hingga pencairan dana sangat mudah dan cepat;
 - c. Agunan yang dijadikan jaminan tidak memberatkan, bahkan beberapa debitur hanya menyerahkan fotokopi KTP, foto kapal yang dimiliki, atau buku nikah;
 - d. Tidak ada pemotongan atas pinjaman yang diterima;
7. Program KUR meningkatkan nilai omzet nasabah, sehingga meningkatkan margin keuntungan usaha.
8. Program KUR belum maksimal dalam meningkatkan lapangan pekerjaan. Hal ini ditandai bahwa sebagian besar responden tidak mengalami penambahan pekerja/ pegawai setelah mendapatkan pembiayaan KUR.

Dari pelaksanaan survey pelaksanaan program KUR tersebut, beberapa saran dan rekomendasi yang diajukan diantaranya:

1. Bunga pinjaman kepada penerima KUR dapat dipertimbangkan untuk diturunkan;
2. Pencairan dana KUR oleh Bank Penyalur sebaiknya tidak dipotong angsuran pertama mengingat potongan tersebut dapat dimaksimalkan untuk memutar usaha kembali;
3. Program KUR di Papua Barat sebagian besar diberikan kepada sektor yang kurang produktif seperti sektor perdagangan. Oleh karena itu, sebaiknya penyaluran KUR lebih banyak diarahkan kepada sektor usaha yang lebih produktif seperti sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan. Hal ini disebabkan pemberian KUR pada sektor produktif lebih menggerakkan roda perekonomian dan menyerap lapangan pekerjaan baru;
4. Persebaran penerima KUR di Papua Barat sebagian besar berada di daerah yang kondisi perekonomiannya relatif lebih maju. Oleh karena itu, penyaluran KUR sebaiknya lebih diarahkan pada daerah yang perekonomiannya relatif masih berkembang.

Pembiayaan UMi

Pemerintah menyadari bahwa implementasi penyaluran KUR sampai dengan saat ini belum mampu mencapai target yang diharapkan karena banyaknya calon nasabah potensial KUR yang tidak memenuhi studi kelayakan perbankan (*unbankable*). Oleh karena itu, pemerintah telah mengagagas skema baru penyaluran kredit kepada UMKM yang disebut program Pembiayaan Ultra Mikro (*Ultra Micro Finance – UMi*) dengan karakteristik nasabah *unbankable* tetapi memiliki kelayakan usaha, diantara indikatornya yaitu tingkat keuntungan (*profitability*) dan kesinambungan usaha (*sustainability*). Pembiayaan UMi merupakan penyediaan dana yang bersumber dari Pemerintah atau bersama dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada UMKM. Berbeda dengan KUR, yang agen penyalurnya adalah perbankan, untuk UMi sebagai agen penyalurnya adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), seperti PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Bahana Artha Ventura (BAV).

Prinsip dasar dari pembiayaan UMi diantaranya (1) Pemberdayaan dan penajaman (*empowerment and enhacement*) lembaga penyalur yang sudah ada, (2) pendampingan kepada nasabah (*end user*) dan (3) fokus pada produk pembiayaan yang telah berhasil sehingga tidak menguji coba atau membuat produk pembiayaan baru. Dalam rangka pelaksanaan UMi, pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi dalam melakukan *sharing* pendanaan untuk percepatan pembangunan di daerah pada umumnya dan secara khusus meningkatkan kesempatan usaha bagi UMKM.



Bab III

Perkembangan dan Analisis APBD

Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan membutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah untuk saat ini lebih didominasi oleh penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga ke depan secara

bertahap diharapkan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semua pengeluaran untuk pembangunan daerah dan sumber dana yang diperlukan tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai sebuah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dalam merencanakan sumber pendapatan dan alokasi belanja, pemerintah daerah harus melihat kebutuhan riil masyarakat berdasarkan potensi daerah dengan berorientasi pada kepentingan/ skala prioritas pembangunan. Selain itu, APBD merupakan salah satu pendorong (*key leverage*) bagi pertumbuhan ekonomi daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.

Secara total, target pendapatan maupun pagu belanja APBD tahun 2018 seluruh pemerintah daerah di Papua Barat mengalami kenaikan. Pendapatan APBD Papua Barat tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp20.789 miliar atau naik 2,8 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan terjadinya kenaikan yang

Tabel 3.1
Total Pagu dan Realisasi APBD Seluruh Pemerintah Daerah Papua Barat
s.d Triwulan III 2018 (miliar Rupiah)

URAIAN	2017		2018	
	Pagu	Realisasi Triw III	Pagu	Realisasi Triw III
PENDAPATAN	20.218	12.159	20.789	13.158
PENDAPATAN ASLI DAERAH	368	403	977	594
Pendapatan Pajak Daerah	420	275	401	316
Hasil Retribusi Daerah	101	23	107	37
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	101	-	91	15
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	345	104	378	227
DANA PERIMBANGAN	12.454	7.975	11.989	8.438
Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak	2.590	1.657	1.776	782
Dana Alokasi Umum	7.954	5.585	7.963	6.551
Dana Alokasi Khusus	1.810	725	2.241	1.100
Dana Insentif Daerah (DID)	15	8	9	5
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.796	3.781	7.823	4.126
Pendapatan Hibah	20	1	133	14
Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	12	7	18	2
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	168	107	148	115
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.452	3.199	6.375	3.320
Dana Desa	638	381	605	325
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	20	-
Bantuan Keuangan Kepada Desa	173	-	168	101
Pendapatan Lainnya	417	86	355	248
BELANJA	20.942	9.423	22.677	10.686
BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.317	6.168	10.505	6.865
Belanja Pegawai	4.163	2.316	4.375	2.913
Belanja Subsidi	34	20	22	18
Belanja Bunga	10	9	20	6
Belanja Hibah	996	796	963	779
Belanja Bantuan Sosial	445	314	465	365
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi atau Kabupaten atau Kota dan Pemerintah Desa	1.194	506	704	206
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi atau Kabupaten atau Kota dan Pemerintahan Desa	3.441	2.205	3.927	2.573
Belanja Tidak Terduga	28	2	29	5
BELANJA LANGSUNG	10.625	3.255	12.173	3.822
Belanja Barang dan Jasa	5.117	1.861	5.180	2.108
Belanja Modal	4.678	1.394	5.960	1.714
PEMBIAYAAN DAERAH	738	1.060	1.874	274
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.052	846	2.123	93
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	866	846	1.410	93
Penerimaan Pinjaman Daerah	237	-	712	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	314	214	249	181
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	117	49	119	67
Pembayaran Pokok Utang	197	165	130	114

Sumber: LRA Pemda dan SIKD DJPK (data diolah)



cukup signifikan pada target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu, pagu belanja APBD tahun 2018 mencapai Rp22.677 miliar atau naik 8,28 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan pagu belanja tersebut dikarenakan terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada belanja pegawai. Penyebabnya, pada tahun 2018 perhitungan pembayaran THR PNSD ditambahkan komponen tunjangan keluarga, tunjangan tambahan dan tunjangan kinerja. Di samping itu, terdapat kenaikan pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada sebagian pemerintah daerah.

Adapun total realisasi pendapatan APBD seluruh pemerintah daerah di Papua Barat sampai dengan triwulan III 2018 mencapai Rp13,16 triliun atau 63,3 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp10,67 triliun atau 47,12 persen dari target.

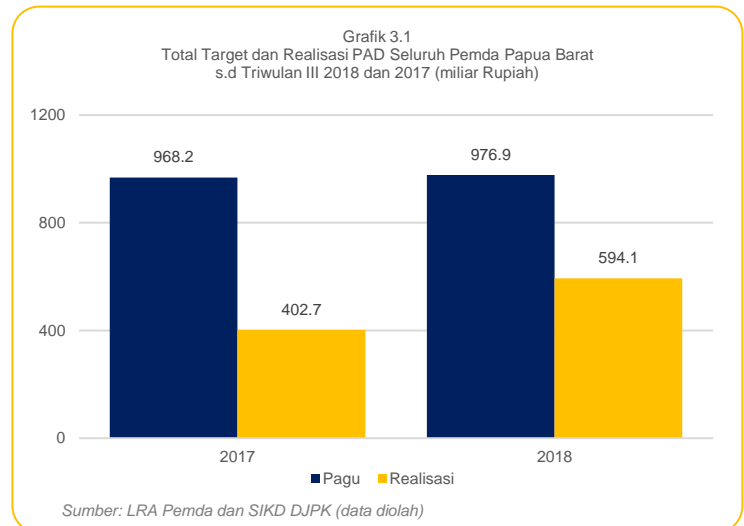
A. PENDAPATAN DAERAH

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

A.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besaran PAD dalam postur APBD merupakan indikator kemandirian daerah. Komponen PAD Provinsi Papua Barat terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Target PAD seluruh pemerintah daerah di Papua Barat pada tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp977 miliar atau meningkat satu persen dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah Rp968 miliar. Dari target tersebut, 60,79 persen atau mencapai Rp594 miliar.



A.1.1 Pajak Daerah

Sampai dengan Triwulan III tahun 2018, total realisasi penerimaan pajak daerah di Papua Barat sebesar Rp316 miliar atau 78,8 persen dari target yang ditetapkan. Pemerintah daerah yang memiliki realisasi penerimaan pajak daerah terbesar yaitu Provinsi Papua Barat mencapai Rp303,6 miliar. Penerimaan pajak daerah Provinsi Papua Barat tersebut disumbang oleh penerimaan pajak kendaraan bermotor, yang mana secara kuantitas kendaraan bermotor menunjukkan peningkatan.

A.1.2 Retribusi Daerah

Total realisasi penerimaan retribusi daerah seluruh pemerintah daerah di Papua Barat sampai dengan triwulan III tahun 2018 mencapai Rp37 miliar atau 34,5 persen dari target yang ditetapkan. Daerah yang memiliki realisasi penerimaan retribusi daerah terbesar yaitu Kota Sorong mencapai Rp5,9 miliar.

A.1.3 Lain-Lain PAD yang Sah

Sampai dengan triwulan III tahun 2018 total penerimaan Lain-lain PAD yang Sah seluruh pemerintah daerah di Papua Barat sebesar Rp227



miliar atau mencapai 60,1 persen dari target yang ditetapkan. Daerah yang memiliki realisasi tertinggi penerimaan lain-lain PAD yang sah yaitu Kab Manokwari Selatan mencapai Rp109,1 miliar.

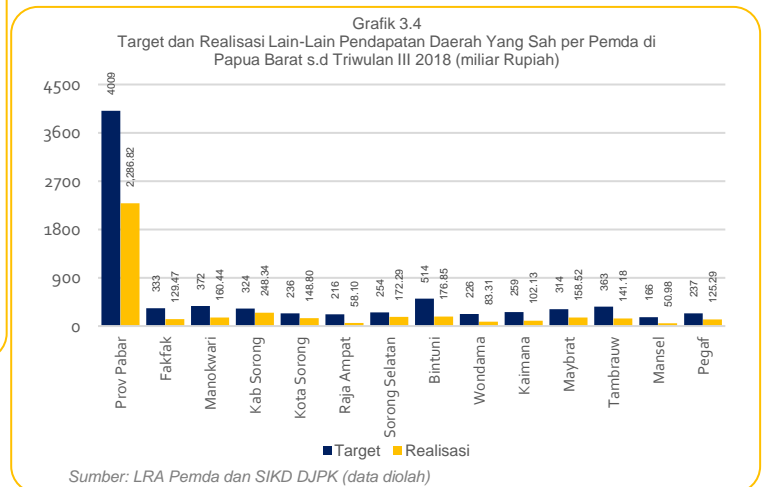
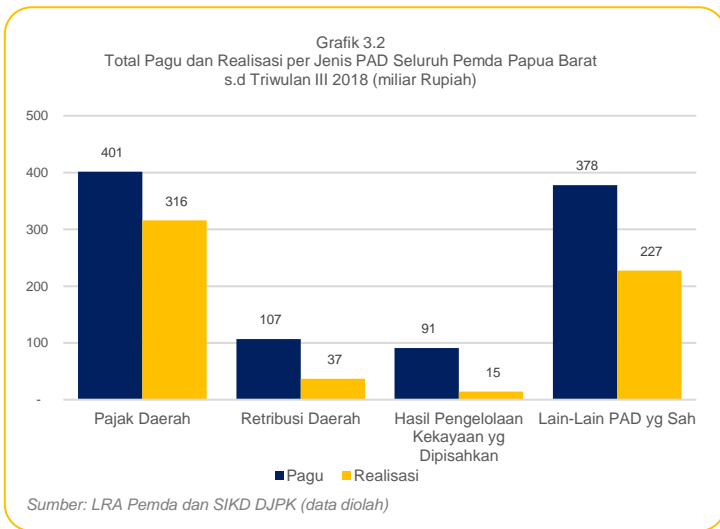
A.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan seluruh pemerintah daerah di Papua Barat sampai dengan triwulan III tahun 2018 sebesar Rp15 miliar atau mencapai 16,5 persen dari target yang ditetapkan.

pendapatan transfer, porsi terbesar yaitu DAU sebesar Rp7,96 triliun (66,4 persen). Sampai dengan triwulan III 2018, daerah yang memiliki realisasi pendapatan transfer tertinggi di Papua Barat yaitu Kab. Teluk Bintuni Rp758 miliar (74,6 persen) dan Pemerintah Provinsi Papua Barat mencapai Rp 1.05 triliun (36,2 persen).

A.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sampai dengan triwulan III 2018, total realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah seluruh pemerintah daerah di Papua Barat mencapai Rp4,04 triliun atau 51,67 persen dari target. Daerah yang memiliki realisasi terbesar adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar Rp32,39 miliar (62,1 persen).



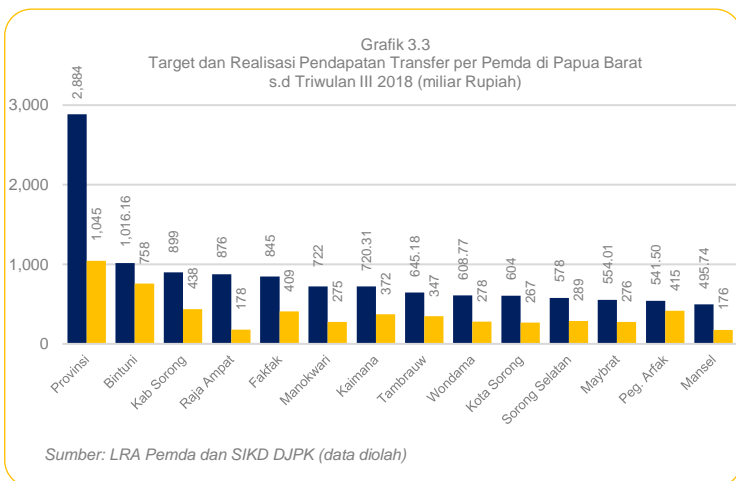
A.2 Pendapatan Transfer

Total target pendapatan transfer seluruh pemerintah daerah di Papua Barat tahun 2018 sebesar Rp11,99 triliun atau turun 3,7 persen dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah Rp12,45 triliun. Dari seluruh komponen

B. BELANJA DAERAH

Total pagu belanja daerah tahun 2018 seluruh pemerintah daerah di Papua Barat mencapai Rp22,67 triliun atau meningkat 8,29 persen dari tahun sebelumnya. Berdasarkan jenisnya, porsi belanja daerah terbesar yaitu belanja modal mencapai 26,29 persen dan belanja pegawai mencapai 23,85 persen.

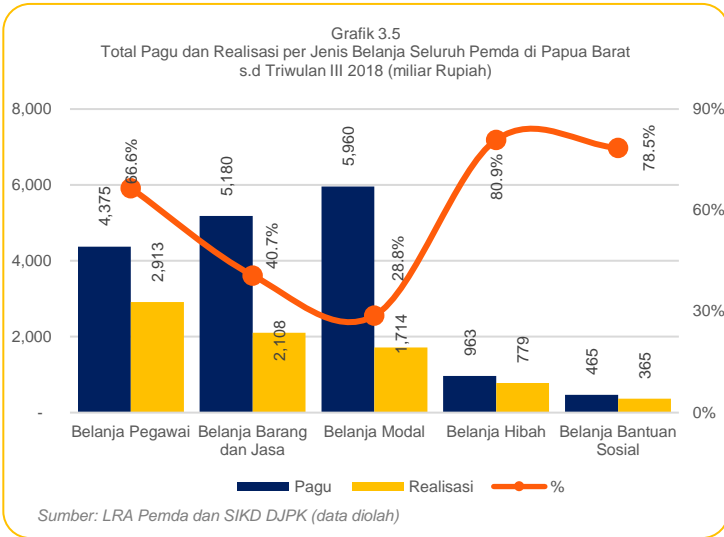
Sampai dengan triwulan III 2018, total realisasi belanja daerah di Papua Barat relatif masih rendah yaitu sebesar Rp7,87 triliun atau 46,5 persen dari pagu. Untuk realisasi belanja daerah tertinggi yaitu belanja bantuan hibah sebesar 80,9 persen dan



belanja bantuan sosial mencapai 78,5 persen. Sementara itu, belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar 40,7 persen dan 28,8 persen.

- ✚ Keterlambatan usulan pengadaan dari SKPD ke ULP (Unit Layanan Pengadaan).
- ✚ Masih banyak daerah rawan konflik dan masalah pembebasan tanah.
- ✚ Proses pengadaan yang terlalu panjang/ lama.

Berdasarkan trend realisasi APBD Papua Barat pada dua tahun terakhir (2016-2017) dan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi, maka diperkirakan realisasi APBD sampai dengan akhir 2018 sebagai berikut:



Tabel 3.2
Prognosis Realisasi APBD Provinsi Papua Barat s.d. Triwulan IV 2018

Uraian	Pagu	Realisasi s.d Triw III		Perkiraan Realisasi s.d. Triw IV	
		Rp	% Real thd Pagu	Rp	% Real thd Pagu
PENDAPATAN DAERAH	20.789,3	13.157,6	63,3%	20.893,2	100,50
BELANJA DAERAH	22.677,3	10.686,4	47,1%	19.389,1	85,50
SURPLUS DEFISIT		2.471,2		1.504,1	

(miliar Rupiah)

C. PROGNOSIS REALISASI APBD SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2018

Sampai dengan akhir tahun 2018, diperkirakan terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi pencapaian realisasi pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Papua Barat, yaitu:

- ✚ Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif rendah dari target yang ditetapkan karena tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam (*raw material*), dimana pasar komoditi internasional masih dalam kondisi pemulihan (*economic recovery*).
- ✚ Kapasitas SDM relatif kurang memadai sehingga pelaksanaan anggaran tidak berjalan optimal.
- ✚ Keterlambatan penetapan SK penunjukan/ penggantian pejabat perbendaharaan.
- ✚ Keterbatasan jumlah SDM yang berminat menjadi panitia pengadaan barang dan jasa karena takut berurusan dengan pihak berwajib.
- ✚ Keterbatasan pejabat pengadaan yang bersertifikat.
- ✚ Sering terjadi mutasi / pergantian pejabat terkait dengan pengelolaan keuangan di SKPD.

Berdasarkan tabel prognosis realisasi APBD tersebut, dapat dijelaskan bahwa dengan melihat tren realisasi pendapatan pada tahun 2016 dan 2017 yang berkisar antara 100 – 105 persen, maka perkiraan realisasi pendapatan daerah seluruh pemerintah daerah di Papua Barat sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai Rp20,89 triliun atau 100,5 persen. Sementara itu, dengan melihat tren realisasi belanja tahun 2016 dan 2017 yang berkisar antara 85 - 90 persen, maka perkiraan realisasi belanja daerah sampai akhir tahun 2018 mencapai Rp19,39 triliun atau 85,5 persen. Sehingga pada tahun 2018, realisasi APBD lingkup Provinsi Papua Barat diperkirakan terjadi surplus anggaran sebesar Rp1,50 triliun.



Bab IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam periode waktu tertentu.

Tabel 4.1
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah Papua Barat
Periode Triwulan III 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi Triw III 2017			Realisasi Triwulan III 2018			Kenaikan / Penurunan
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Pusat	Daerah	Konsolidasi	
Penerimaan Pendapatan	1.399	11.959	13.358	1.427	12.352	13.779	3,2%
Pendapatan Perpajakan	1.208	275	1.484	1.222	316	1.538	3,7%
Pendapatan Bukan Pajak	190	128	318	205	278	483	51,9%
Hibah	-	-	-	-	-	-	-
Transfer	-	11.556	(887)	-	11.758	(925)	4,3%
Pengeluaran Belanja	16.176	9.423	25.599	16.598	10.686	27.284	6,6%
Belanja Pemerintah	3.733	6.712	10.445	3.914	7.907	11.821	13,2%
Transfer	12.443	2.711	15.154	12.683	2.779	15.462	2,0%
Surplus / Defisit	(14.778)	2.536	(12.242)	(15.171)	1.666	(13.505)	10,3%

Sumber: LRA Pemda dan SPAN (data diolah)

Sampai dengan triwulan III 2018, realisasi penerimaan pendapatan konsolidasian di Papua Barat sebesar Rp13,78 triliun miliar atau naik 3,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi pengeluaran belanja konsolidasian sampai dengan triwulan III 2018 mencapai Rp27,28 triliun atau naik sebesar 6,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan pemerintahan umum (*General Government Revenue*) atau pendapatan konsolidasian tingkat wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

B.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan

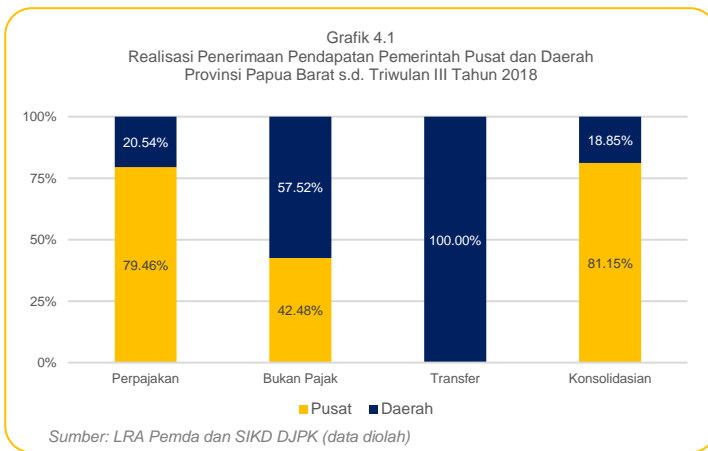
Proporsi pendapatan konsolidasian Papua Barat tahun 2018 terbesar yaitu pendapatan transfer mencapai 82,01 persen dari total target pendapatan konsolidasian. Sementara itu proporsi pendapatan perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian masing-masing sebesar 12,45 persen dan 0,55 persen.

Untuk target pendapatan perpajakan konsolidasian Papua Barat tahun 2018 sebesar Rp2.988 miliar atau turun sebesar -14,2 persen dari tahun sebelumnya disebabkan target penerimaan perpajakan pemerintah pusat mengalami penurunan yang didasarkan pada asumsi bahwa kondisi perekonomian pada tahun 2018 masih dalam tahap pemulihan (*economic recovery*). Selain itu, tantangan dan dinamika yang cukup



berat mengingat volatilitas harga komoditas internasional seperti minyak dan gas bumi turut mempengaruhi target penerimaan pajak di Papua Barat.

Sampai dengan triwulan III 2018, realisasi pendapatan pemerintah pusat tertinggi yaitu berasal dari pendapatan perpajakan sebesar 77,9 persen dari target. Sementara itu, pendapatan pemerintah daerah berasal dari pendapatan transfer mencapai 100 persen dari target.



B.2 Analisis Perubahan

Bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sampai dengan triwulan III 2018 terjadi (*growth*) pertumbuhan realisasi pendapatan perpajakan konsolidasian sebesar 8,16 persen dari Rp1,48 triliun menjadi Rp1,54 triliun disebabkan terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada pendapatan PPN Dalam Negeri. Selain itu, terjadi kenaikan realisasi pendapatan bukan pajak konsolidasian disebabkan terjadi peningkatan pada realisasi pendapatan jasa pelayanan kebandarudaraan dan jasa pelayanan kepelabuhanan.

Tabel 4.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Peroraiakan Konsolidasian Papua Barat
Periode Triwulan III 2018 dan 2017

Uraian	2017			2018		
	Target satu Thn (Miliar Rp)	Real Tr III (Miliar Rp)	%	Target satu Thn (Miliar Rp)	Real Tr III (Miliar Rp)	%
Pemda	420	275	65,48%	401	316	78,75%
Pusat	3.004	1208	40,23%	2.586	1.222	47,25%
Konsolidasian	3.424	1483	43,32%	2.987	1.538	51,48%

Sumber: KPP Manokwari, KPP Sorong, SIKD DJPK SPAN dan LRA Pemda (data diolah)

B.3 Analisis Realisasi Pendapatan Perpajakan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode triwulan III tahun 2018, PDRB Riil Papua Barat sebesar Rp15,41 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,89 persen (*yoy*). Sementara itu pada periode yang sama, terjadi pertumbuhan realisasi pendapatan perpajakan konsolidasian sebesar 8,16 persen. Berdasarkan perbedaan antara angka pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan perpajakan yaitu sebesar 1,27 persen [6,89 – 8,16], mengindikasikan bahwa masih banyak potensi penerimaan perpajakan yang belum dioptimalkan sebagai akibat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi.

C. BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja Pemerintahan Umum (*General Government Spending*) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resipikal (berelasi).

C.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan

Proporsi belanja konsolidasian terbesar tahun 2018 Papua Barat yaitu belanja pemerintah mencapai 71,06 persen dari total pagu belanja konsolidasian. Sementara itu belanja transfer mencapai 28,93 persen.

Untuk pagu belanja konsolidasian terjadi kenaikan pada tahun 2018 sebesar 5,67 persen dibandingkan pagu tahun 2017, yaitu dari Rp44.047 miliar menjadi Rp46.501 miliar. Alokasi belanja APBN 2018 yang naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh peningkatan kebutuhan anggaran di daerah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Negara/Lembaga dan belanja daerah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).



C.2 Analisis Perubahan

Jika dilihat per jenis belanja, sampai dengan triwulan III 2018, realisasi belanja konsolidasian tertinggi yaitu belanja bantuan sosial dan belanja lainnya masing-masing mencapai 77,07 persen dan 63,21 persen. Sementara itu realisasi belanja modal konsolidasian terlihat belum optimal dibandingkan dengan belanja yang lain, sehingga diperlukan akselerasi untuk merealisasikan belanja tersebut sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

Tabel 4.3
Perbandingan Realisasi Belanja Konsolidasian Papua Barat
Periode Triwulan III 2018 dan 2017

Uraian	2017			2018		
	Pagu 1 Thn (Miliar Rp)	Real Tr III (Miliar Rp)	%	Pagu 1 Thn (Miliar Rp)	Real Tr III (Miliar Rp)	%
Belanja Pegawai	6.124,35	3.258,14	53,20%	6.850,33	3.965,54	57,89%
Belanja Barang	7.242,08	3.065,73	42,33%	7.908,13	3.610,28	45,65%
Belanja Modal	7.700,33	2.969,98	38,57%	8.644,59	3.057,99	35,37%
Belanja Sosial	457,71	324,12	70,81%	489,69	377,39	77,07%
Belanja Lainnya	3.938,98	3.538,21	89,83%	5.678,60	3.589,70	63,21%

Sumber: SIKD DJPK, SPAN dan LRA Pemda (data diolah)

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

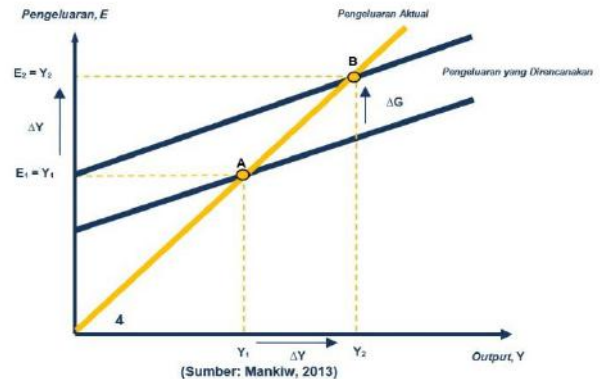
Berdasarkan Teori Perpotongan Keynesian (*Keynesian Cross Theory*), salah satu variabel yang berpengaruh terhadap pencapaian output (Y) yaitu belanja pemerintah (*government spending*). Kenaikan belanja pemerintah akan mendorong output menjadi lebih besar dimana ekuilibrium bergerak dari titik A ke titik B dan output meningkat dari Y_1 ke Y_2 (Mankiw, 2013).

Nilai output dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran *agregat* yaitu pengeluaran konsumen, pengeluaran investasi, pembelian pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor dikurangi impor (*net export*) yang ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Nilai output suatu daerah diwujudkan dalam bentuk PDRB. Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dilihat dari sisi belanja, dihitung dengan cara membandingkan nilai pengeluaran pemerintah

Gambar Pengaruh Kenaikan Pengeluaran Pemerintah terhadap Output Menurut Perpotongan Keynesian



terhadap PDRB. Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi, kontribusi pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap PDRB.

Sampai dengan triwulan III 2018, kontribusi belanja pemerintah konsolidasian terhadap PDRB Provinsi Papua Barat sebesar Rp11,8 triliun / Rp15,4 triliun = 76,6 persen. Adapun kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB sebesar Rp2,9 triliun / Rp15,4 triliun = 18,8 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi belanja pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah cukup signifikan terhadap perekonomian Papua Barat.

Tabel 4.4
Kontribusi Belanja Pemerintah (Pusat dan Daerah) terhadap PDRB Papua Barat
s.d.Triwulan III 2018

Uraian	Realisasi
Belanja Konsolidasian (triliun Rupiah)	11,80
PMTB (triliun Rupiah)	2,90
PDRB (triliun Rupiah)	15,40
Kontribusi Belanja Konsolidasian terhadap PDRB (%)	76,6%
Kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)	18,8%

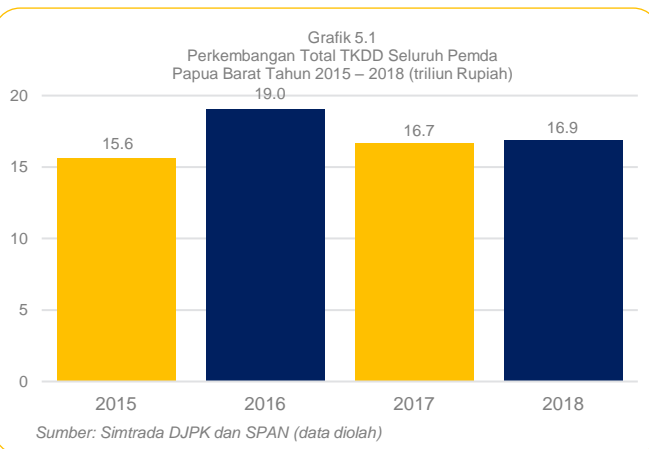
Sumber: LRA Pemda, SIKD DJPK, SPAN, dan BPS Provinsi Papua Barat (data diolah)



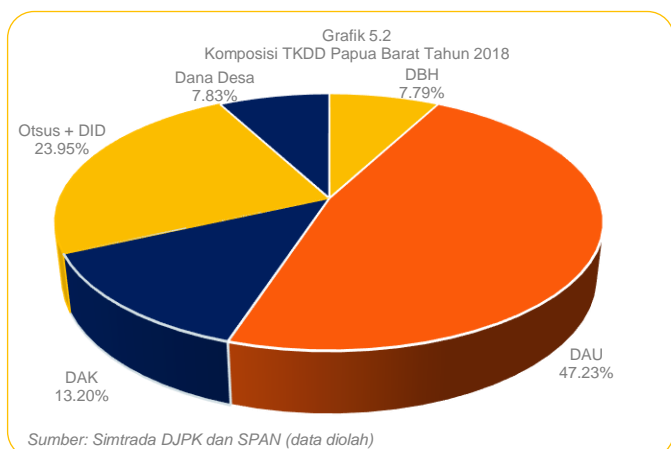
Bab V

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Sebagai bentuk penguatan desentralisasi fiskal, dana yang diberikan kepada Provinsi Papua Barat dalam bentuk TKDD semakin meningkat tiap tahun. Pada tahun 2015 total TKDD seluruh pemerintah daerah di Provinsi Barat sebesar Rp15,6 triliun. Kemudian pada tahun 2018 nilainya mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp16,9 triliun atau naik sebesar 8,33 persen.



Berdasarkan komposisinya, komponen terbesar TKDD Papua Barat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 47,23 persen kemudian diikuti Dana Otonomi Khusus dan Dana Insentif Daerah (Otsus + DID) sebesar 23,95 persen, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 7,79 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 13,2 persen, dan Dana Desa sebesar 7,83 persen.

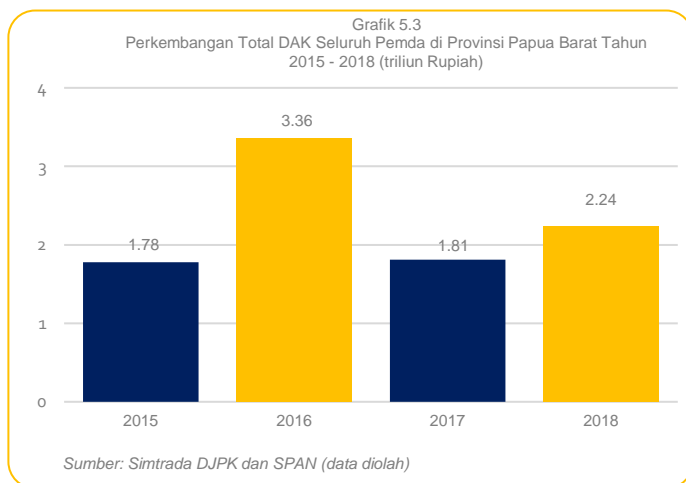


Salah satu jenis dana transfer yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK merupakan salah satu mekanisme transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.

Berbeda dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat *block grant*, DAK bersifat *conditional grant*, artinya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan DAK. Dalam penggunaannya, daerah harus mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Selain itu DAK juga bersifat



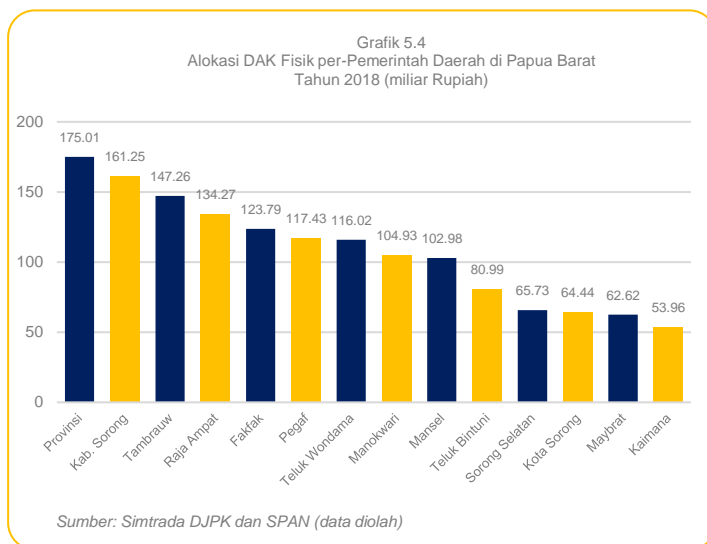
close-end grant, artinya dana yang diterima untuk satu tahun anggaran sudah ditentukan dari awal tahun anggaran. Apabila sampai akhir tahun anggaran daerah tidak dapat menggunakannya sesuai dengan petunjuk teknis, maka sisanya tidak dapat disalurkan. DAK yang ditransfer kepada Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2015, DAK yang diterima Provinsi Papua Barat sebesar Rp1,78triliun. Kemudian nilainya mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp2,24 triliun atau naik sebesar 25,8 persen.



A. Penyaluran DAK Fisik

TKDD yang diterima Pemerintah Daerah ditransfer secara terpusat melalui KPPN Jakarta II ke seluruh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun mulai tahun 2017, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada pemerintah daerah, khusus penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan

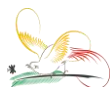
oleh seluruh KPPN yang berada di daerah. DAK Fisik disalurkan melalui KPPN di daerah dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD. Sementara itu, mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Pada tahun 2018, total DAK Fisik yang dialokasikan kepada seluruh Pemda di Provinsi Papua Barat sebesar Rp1,51 triliun. Alokasi tertinggi diberikan kepada Pemda Provinsi Papua Barat sebesar Rp175,01 miliar, sedangkan terendah diberikan kepada Pemda Kab. Kaimana sebesar Rp53,96 miliar.



DAK Fisik terdiri atas DAK Fisik bertahap, DAK Fisik sekaligus, dan DAK Fisik Campuran. Sampai dengan triwulan III 2018, penyaluran DAK Fisik untuk wilayah Papua Barat mencapai Rp720,18 miliar atau 47,7 persen dari pagu. Dengan demikian untuk tahun 2018 masih terdapat sisa dana yang belum terealisasi sebesar Rp790,5 miliar. Dari realisasi tersebut, Kab Fakfak memiliki persentase realisasi tertinggi mencapai 64,6 persen. Sementara itu, Kab Kaimana memiliki persentase realisasi terendah sebesar 17,7 persen.

Tabel 5.1
Pagu dan Realisasi DAK Fisik per Pemerintah Daerah di Papua Barat s.d Triwulan III 2018

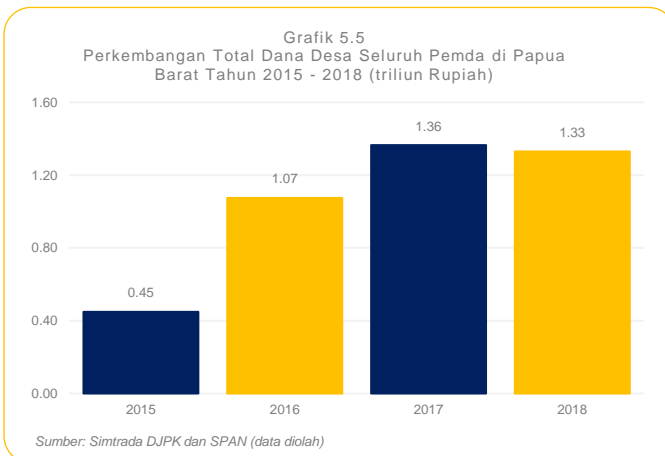
No	Pemda	Pagu	Realisasi	% Real
1	Provinsi	175,013,261,000	91,225,557,790	52.1
2	Manokwari	104,928,927,000	39,382,353,950	37.5
3	Mansel	102,989,116,000	64,696,503,400	62.8
4	Teluk Bintuni	80,989,592,000	22,502,105,914	27.8
5	Teluk Wondama	116,024,673,000	66,013,969,350	56.9
6	Pegunungan Arfak	117,427,252,000	73,049,411,150	62.2
7	Kota Sorong	64,440,496,000	38,145,993,000	59.2
8	Kab Sorong	161,247,859,000	70,589,119,000	43.8
9	Sorong Selatan	65,725,072,000	21,709,030,000	33.0
10	Raja Ampat	134,273,839,000	34,127,147,000	25.4
11	Tambrauw	147,259,120,000	93,351,113,000	63.4
12	Maybrat	62,621,375,000	15,915,666,000	25.4
13	Fakfak	123,796,493,000	79,925,149,950	64.6
14	Kaimana	53,963,411,000	9,547,080,550	17.7
	Total	1,510,700,486,000	720,180,200,054	47.7



B. Penyaluran Dana Desa

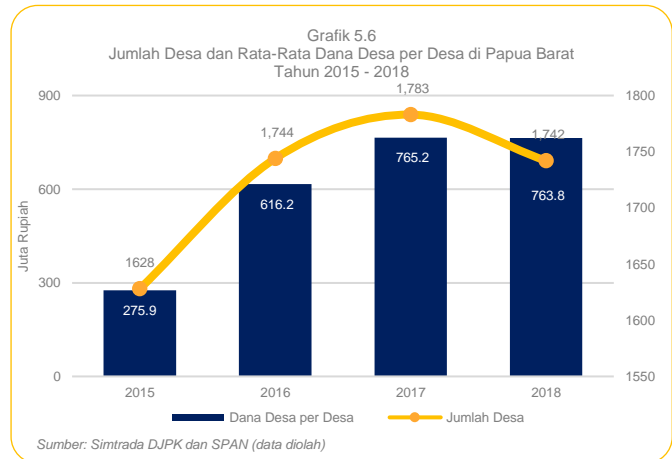
Dana desa merupakan dana dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Seperti halnya dengan DAK, secara konseptual Dana Desa bersifat *conditional grant*, artinya penggunaan Dana Desa dibatasi oleh persyaratan tertentu. Penggunaan Dana Desa dilakukan sesuai prioritas penggunaan yang ditetapkan oleh Menteri Desa PDTT dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/ walikota.

Jumlah dana desa yang diterima seluruh Pemda di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2015 dana desa yang disalurkan ke Provinsi Papua Barat sebesar Rp450 miliar. Kemudian pada tahun 2018 nilainya mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat menjadi sebesar Rp1,33 triliun (naik 196 persen).



Jumlah desa dan rata-rata dana desa yang diterima setiap desa di Provinsi Papua Barat juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2015 jumlah desa yang menerima dana desa meningkat menjadi 1.628 desa, dimana rata-rata tiap desa memperoleh Rp275.999.362. Kemudian Pada tahun 2018 jumlah desa yang menerima dana desa meningkat menjadi 1.742 desa, dimana rata-rata tiap desa memperoleh Rp763.792.342. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah pusat yang semakin kuat untuk mencapai salah satu

program nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.



Berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah PMK Nomor 112/PMK.07/2017, penyaluran dana desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap. Pada tahap I, sebesar 20 persen. Selanjutnya pada tahap II dan tahap III masing-masing sebesar 40 persen.

Penyaluran dana desa Tahap I dilaksanakan paling cepat bulan Januari 2018 dan paling lambat bulan Juni minggu ketiga Tahun 2018, yaitu sebesar 20 persen dari total pagu dana Desa. Dari pagu tahap I sebesar Rp226.105.252.200, telah direalisasikan sebesar Rp266.105.249.200 atau 100 persen dari pagu tahap I.

Pemda dengan pengajuan penyaluran paling cepat untuk dana desa Tahap I adalah Pemda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu pada tanggal 13 Februari 2018 dengan jumlah sebesar Rp19.177.945.600. Untuk pemda yang lain mayoritas penyalurannya paling pada batas akhir penyaluran yaitu minggu ketiga bulan Juni 2018. Keterlambatan tersebut dikarenakan proses pertanggungjawaban dana desa Tahap I belum memenuhi batas minimal yang dipersyaratkan. Selain itu juga lamanya pemda harus melakukan revisi Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa.



Penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan paling cepat bulan Maret 2018 dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2018, yaitu sebesar 40 persen dari total pagu Dana Desa. Dari pagu tahap II sebesar Rp532.210.504.400, telah direalisasikan seluruhnya sebesar Rp532.209.739.200 atau 100 persen dari pagu tahap II untuk 1.742 desa. Penyaluran Tahap II dilaksanakan setelah persyaratan dipenuhi yaitu Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya, dan Laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya. Pemda dengan pengajuan penyaluran paling cepat untuk dana desa Tahap II adalah Pemda Kabupaten Maybrat yaitu pada tanggal 16 Mei 2018 dengan jumlah sebesar Rp70.613.308.000.

Tabel 5.2
Pagu dan Realisasi Dana Desa per Pemerintah Daerah di Papua Barat
s.d Triwulan III 2018

No	Pemda	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Manokwari	122,819,328,000	73,691,596,000	60
2	Mansel	50,765,671,000	30,459,402,600	60
3	Teluk Bintuni	95,889,728,000	95,889,609,400	100
4	Teluk Wondama	60,808,826,000	36,484,651,800	60
5	Pegunungan Arfak	124,105,369,000	74,463,221,400	60
6	Kab Sorong	169,164,934,000	101,498,959,000	60
7	Sorong Selatan	90,956,708,000	54,574,024,000	60
8	Raja Ampat	90,332,849,000	54,199,708,000	60
9	Tambrau	156,933,803,000	94,160,281,000	60
10	Maybrat	176,533,271,000	105,919,962,000	60
11	Fakfak	114,404,235,000	68,642,541,000	60
12	Kaimana	77,811,539,000	46,686,923,400	60
Total		1,330,526,261,000	836,670,879,600	62.9

C. Permasalahan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Secara umum masalah-masalah yang ditemukan dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada triwulan III 2018 adalah sebagai berikut:

- ✚ Masih banyak pemerintah daerah yang belum memenuhi dokumen persyaratan DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana yang telah dipersyaratkan;
- ✚ Kendala teknologi informasi yang menghambat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa seperti jaringan internet yang lambat di beberapa daerah;

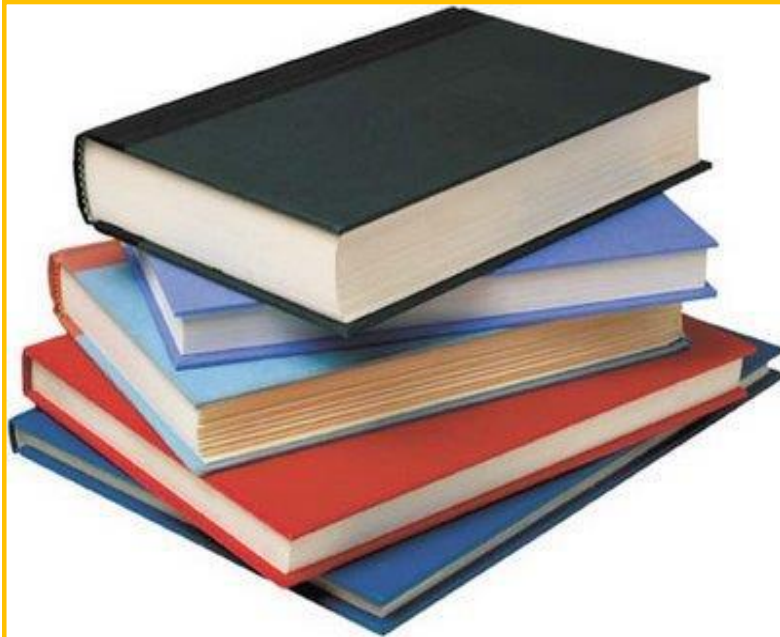
- ✚ Verifikasi KPPN atas data dan dokumen yang diupload pemerintah daerah ke OM-SPAN membutuhkan waktu dan ketelitian agar penyaluran DAK Fisik tidak ada yang terlewat atau tidak salur;
- ✚ Operator pemerintah daerah belum lancar mengoperasikan OM-SPAN;
- ✚ KPPN belum maksimal melatih operator pemerintah daerah dalam pengoperasian OM-SPAN, bahkan ada yang belum melakukan *training*;
- ✚ Pemerintah daerah telat melakukan proses lelang sehingga penyampaian daftar kontrak kegiatan menjadi terlambat dan progres pekerjaan sebagai prasyarat penyaluran triwulan berikutnya menjadi terhambat;
- ✚ Keberadaan tenaga pendamping dana desa kurang maksimal (tidak profesional dan tidak dapat menjangkau seluruh desa);
- ✚ Kompetensi aparatur desa yang rendah, menyebabkan keterlambatan penyusunan RKPDes dan APBDes, sehingga dana desa belum dapat disalurkan ke RKD;
- ✚ Kondisi geografis daerah yang sulit dan menantang menyebabkan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kurang optimal;

D. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan perkembangan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan triwulan III tahun 2018 serta identifikasi permasalahan yang ada, rekomendasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat diantaranya:

- ✚ Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada pemerintah daerah (kepala daerah) terutama mengenai mekanisme dan persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- ✚ Diperlukan bimbingan teknis yang lebih intensif kepada petugas teknis pemerintah daerah;
- ✚ Diperlukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara (*In Depth Interview*) kepada pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa.





DAFTAR PUSTAKA

- Berry, A., Rodriguez, E., & Sandee, H. (2001). *Small and Medium Enterprise Dynamics In Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Volume 37, Issue 3, 2001 . pp. 363-84.
- Berry, A., Rodriguez, E., & Sandee, H. (2002). *Firm and Group Dynamics in the Small and Medium Enterprise Sector in Indonesia*. *Small Business Economics*, 18. Pp. 141-61.
- Blanchard, Oliver. (2006). *Macroeconomics—forth edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Bourletidis, K., & Triantafyllopoulos, Y. (2014). *SMEs Survival in Time of Crisis: Strategies, Tactics and Commercial Success Stories*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. Vol. 148, pp. 639-644.
- Chittithaworn, C., Islam, A., Keawchana, T. & Yusuf, D. H. (2011). *Factors Affecting Business Success of Small & Medium Enterprises (SMEs) in Thailand*. *Asian Social Science*. Vol. 7 No. 5, pp. 180-190.
- Funabashi, G. (2013). *Small and Medium Enterprises under the Global Economic Crisis: Evidence from Indonesia*. Asian Institute of Management Working Paper 14-012.
- Khan, S. (2015). *Impact of sources of finance on the growth of SMEs: evidence from Pakistan*. *Decision*, Vol. 42 No. 1, pp. 3-10.
- Krugman, P., & Wells R. (2011). *Economics-Second Edition*. London: Worth Publishers.
- Mankiw, Gregory N. (2013). *Macroeconomics-eight edition*. London: Worth Publisher.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah PMK Nomor 112/PMK.07/2017
- Ravallion, Martin. (1995). *Growth and Poverty: Evidence for Developing Countries in The 1990s*. *Economics Letters*. Vol. 48 (June): 411-417.
- Seyoum, B. (2009). *Export-Import Theory, Practices, and Procedures -Second Edition*. New York: Routledge.
- Wengel, J., & Rodriguez, E. (2006). *SME Export Performance in Indonesia After The Crisis*. *Small Business Economics*. Vol. 26 No. 1, pp. 25-37.



**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Papua Barat**

Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari
Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat
Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kelurahan Anday, Arfai, Kab. Manokwari
Telepon (0986) 214122 - Faksimili (0986) 214124
e-mail: kanwildjbn.papuabarat@gmail.com
website: djpbk.kemenkeu.go.id/kanwil/papuabarat